Tata Kelola Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik

Oleh:

Rahmad Adi Satrio

2106016111

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp. 1

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama	:	Rahmad Adi Satrio
NIM	:	21060160111
Jurusan	:	Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	Tata Kelola Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2025
Pembimbing



Masrohatun M.Si
NIP. 19880621201801200

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TATA KELOLA PROGRAM KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Disusun Oleh:

Rahmad Adi Satrio

21060160111

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji pada tanggal 23 Juni 2025 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial

(S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua	Sekretaris
Masrohatun M.Si	**Tika Ifrida Takayasa M.A**
NIP. 198806212018012001	NIP. 198811152019032018
Penguji Utama I	**Dosen Pembimbing**
Prof.Dr.Tholkhatul Khoir, M.Ag.	**Masrohatun M.Si**
NIP. 197701202005011005	NIP. 198806212018012001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwasannya skripsi ini merupakan hasil kerja saya pribadi dan di dalamnya tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi. Pengetahuan yang di dapat berasal dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan. Adapun sumbernya telah tertera dalam daftar pustaka.

Semarang, Juni 2025

Rahmad Adi Satrio

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Tata Kelola Program Pemerintah KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak adanya kekurangan dan keterbatasan peneliti. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kita tahu bahwa kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Namun, peneliti berharap nantinya skripsi ini akan memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang tidak henti-hentinya memberikan keberkahan yang melimpah kepada penulis.
2. Rasulullah Muhammad SAW. yang selalu menjadi arah dan tujuan hidup penulis.
3. Orang tua tersayang, Ibu Wiwik Sudiarti dan Bapak Emnisman yang selalu memberikan doa dan dukungan tiada henti kepada penulis. Tiada kata yang lebih pantas diucapkan selain terima kasih atas segala doa dan dukungan yang selalu diberikan. Semoga Allah SWT. selalu memberikan karunia-Nya. Selalu semangat dan sehat untuk kalian berdua, Mami dan Papi.
4. Ibu Masrohatun, M.Si., selaku dosen pembimbing dan wali dosen, yang tidak hanya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi, tetapi juga menjadi sosok Ibu kedua selama menjalani kehidupan di dunia perkuliahan. Dengan penuh ketulusan, beliau mau untuk meluangkan waktu, tenaga dan kesabarannya dalam membimbing penulis, baik dari segi metodologi

penulisan, penguasaan materi hingga sikap dan etika akademis. Dalam tiap proses, beliau tidak hanya mengarahkan secara akademik, tetapi juga memberikan motivasi, semangat dan kepercayaan diri yang sangat berarti, terlebih saat penulis merasa ragu dan bingung. Bimbingan yang beliau berikan tidak hanya menjadi kunci penyelesaian skripsi ini, tetapi juga banyak membentuk kedewasaan dalam berpikir dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Untuk segala ilmu, perhatian dan kebaikan yang beliau berikan, semoga Allah SWT. senantiasa membalas segala kebaikan Ibu dengan keberkahan dan kesehatan serta limpahan rahmat yang tak terhingga.

5. Bapak dan Ibu Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam masa perkuliahan selama di kampus ini.
6. Afifah Dwinawangsih, terima kasih atas segala kontribusi, pengorbanan dan hal-hal baik yang pernah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah yang sangat nyaman, menjadi tempat sandaran, tempat berkeluh kesah dalam segala hal. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup penulis, mengajarkan banyak hal, sangat bersabar, mengerti, memberikan semangat, dan pantang menyerah dalam menghadapi penulis dan akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Komunitas Ruang Abaca, tempat yang mengajarkan berbagai hal pada tiap-tiap kegiatannya, sehingga memberikan pengalaman yang sangat mendalam bagi penulis.
8. Teman-teman Ilmu Politik C yang bersama-sama menempuh pendidikan selama kuliah ini.
9. *To the one who walked through hell, scarred, but unbroken and still standing,* Rahmad Adi Satrio. Apresiasi karena berani untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Berani melawan diri sendiri, terus bangkit untuk menjadi lebih baik dan tidak menyerah. *You broke, and still showed up,* Rahmad Adi.

PERSEMBAHAN

Bismillahhirrahmannirrahim

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yang selalu berdoa dan memberikan dukungan tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta, tak lupa saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan kepada penulis sesuatu yang sangat tak ternilai, sesuatu yang tak bisa dituliskan, sesuatu yang tak akan pernah bisa terbalaskan. Do'a dan dukungan dari kalian yang membuat penulis dapat mencapai titik ini.

MOTTO

"Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"
(QS. Al-BAQARAH (2):216)

"*If they wanna make the world a better place,*
take a look at yourself and then make a change."

(Michael Jackson - Man in the Mirror)

ABSTRAK

Salah satu tindakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan akademik bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi banyak masalah. Ini termasuk polemik pencabutan bantuan secara sepihak, manipulasi data calon penerima, ketidaksesuaian domisili, dan keterlambatan pencairan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola program KJMU dengan menggunakan pendekatan teori *Governability* oleh Jan Kooiman, yang mencakup faktor-faktor seperti *Governing System, System To Be Governed dan Governing Interaction.*

Dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, serta dianalisis melalui reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola KJMU dalam aspek *Governing System* masih bersifat sentralistik, di mana dominasi aktor negara lebih menonjol dibandingkan peran aktor non-pemerintah. Meskipun telah tersedia perangkat regulatif dan instrumen teknis yang memadai, pelaksanaannya masih menekankan pada prosedur administratif tanpa disertai refleksi kebijakan yang berorientasi pada perbaikan struktural.

Pada aspek *System to be Governed*, ditemukan bahwa karakteristik penerima KJMU sangat beragam dari segi latar belakang sosial, universitas asal, kebutuhan ekonomi, hingga persebafran penerima yang mencakup seluruh wilayah administratif DKI Jakarta. Kompleksitas pemadanan data dengan banyak instansi serta P4OP sebagai pelaksana teknis harus menjembatani berbagai jenis perguruan tinggi, lalu terdapat kekurangan SDM dalam pengelolaan yang menyebabkan tekanan konstitusional. Dinamika status ekonomi keluarga menyebabkan ketidaksesuaian antara realitas penerima dan ketentuan kebijakan. Selain itu, skala cakupan program yang melibatkan ratusan universitas dan puluhan ribu penerima menjadikan sistem semakin sulit dikelola secara responsif dan tepat sasaran. Sedangkan dalam dimensi *Governing Interaction*, relasi antarpemangku kepentingan masih bersifat top-down dengan minimnya ruang deliberasi. Partisipasi mahasiswa sebagai penerima manfaat belum difasilitasi secara sistemik, sehingga hubungan antara negara dan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan interaksi yang kolaboratif dan inklusif.

Kata Kunci: Tata kelola, *Governability*, Pendidikan

ABSTRACT

One of the policy measures undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta is the Jakarta Superior Student Card Program, which aims to provide greater academic opportunities for students from underprivileged families. However, in its implementation, the program has faced various challenges, including unilateral revocation of assistance, data manipulation of prospective recipients, domicile discrepancies, and delays in fund disbursement. The objective of this study is to analyze the governance of the KJMU program using Jan Kooiman's Governability framework, which includes the dimensions of the Governing System, the System to be Governed, and Governing Interactions.

Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews and observations, and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the governance of KJMU in the Governing System dimension remains centralized, with state actors dominating over non-government actors. Although adequate regulatory tools and technical instruments are available, implementation still emphasizes administrative procedures without reflective policies aimed at structural improvements.

In the System to be Governed dimension, the recipients of KJMU exhibit diverse characteristics in terms of social background, university origin, economic needs, and geographical distribution across all administrative regions of Jakarta. The complexity of data synchronization with various agencies and the technical execution by P4OP require coordination with diverse higher education institutions. Limited human resources in program management have resulted in institutional strain. Economic dynamics among recipients' families often lead to a mismatch between actual conditions and policy criteria. Furthermore, the program's wide scope—covering hundreds of universities and tens of thousands of recipients—makes it increasingly difficult to manage responsively and accurately. In the dimension of Governing Interaction, relationships among stakeholders remain top-down with limited deliberative space. Student participation as beneficiaries is not yet systematically facilitated, leading to a state–society relationship that has yet to fully reflect collaborative and inclusive interaction.

Keywords: *Governance, Governability, Regional Scholarship*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR BAGAN ..... **xv**

BAB I **1**

PENDAHULAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat penelitian 8
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Teori Penelitian 11
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan 17

BAB II **18**

TATA KELOLA KJMU (*Governability* – Jan Kooiman) **18**

A. Definisi *Governability* 18
1. Governability dan sistem yang akan diatur (*System To Be Governed*) .. 22
2. Governability dan sistem yang mengatur (*Governing System*) 23
3. Governability dan sistem yang berinteraksi (GI) 25

B. Indikator *Governability* 28
BAB III 33
GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA, DINAS PENDIDIKAN, P4OP DAN KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL 33
A. PROVINSI DKI JAKARTA 33
1. Sejarah DKI Jakarta 33
2. Letak Geografis 33
3. Kondisi TopografI 34
4. Kondisi Demografis 34
5. Tingkat Pendidikan 36
6. Kondisi Sosial 37
7. Kondisi Ekonomi 37
B. Dinas Pendidikan DKI Jakarta 39
C. Pusat Pelayanan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) 40
D. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 42
BAB IV 46
TATA KELOLA KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL 46
A. Dominasi Aktor Negara dan Pendekatan Teknokratis dalam Governing System Program KJMU 46
1. Distribusi Peran Aktor dalam Governing System Program KJMU 46
2. Pemerintah Provinsi Menempatkan KJMU sebagai Instrument Pembangunan Sosial Berbasis Bantuan Pendidikan 48
3. Evaluasi KJMU Masih Bersifat Administratif dan Belum Mencapai Refleksi Kebijakan yang Mendalam 55
B. Keberagaman dan Dinamika Sosial Mahasiswa Penerima KJMU Menjadi Tantangan dalam Penyaluran Program 63
1. Tingginya Keberagaman Mahasiswa Penerima Menuntut Penyesuaian Layanan dan Kebijakan 63
2. Kompleksitas Sistem Sosial dan Kelembagaan Membutuhkan Tata Kelola yang Terintegrasi dan Adaptif 66
3. Dinamika Sosial Mahasiswa Memengaruhi Stabilitas Status Kelayakan KJMU 68
4. Skala dalam Tata Kelola Penerima Program KJMU 72

C. Relasi Program KJMU Masih Didominasi Pemerintah, Meski Ada Ruang Partisipatif Terbatas 72
BAB V 79
PENUTUP 79
A. KESIMPULAN 79
B. SARAN 81
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN 86

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2024 34
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin DKI Jakarta 2024 35
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 35
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasrkan Tingkat Pendidikan 36
Tabel 3. 5 Jumlah Sarana Pendidikan 36
Tabel 3. 6 Sumber Pendapatan 37
Tabel 3. 7 Jumlah Moda Transportasi 39
Tabel 3. 8 Jumlah penerima KJMU 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Berita Polemik KJMU 4
Gambar 1. 2 Cuitan Akun Komunitas Mengenai Isu KJMU 5
Gambar 2. 1 Ringkasan Teori *Governability* 28
Gambar 3. 1 Peta Provinsi DKI Jakarta..... 33
Gambar 3. 2 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi 38
Gambar 3. 3 Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta..... 39
Gambar 3. 4 Logo P4OP..... 41
Gambar 3. 5 Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 42
Gambar 4. 1 Halaman Utama Website KJMU 50
Gambar 4. 2 Call Center Whatsapp KJMU 54
Gambar 4. 3 Timeline Pendaftaran KJMU Tahun 2025 56
Gambar 4. 4 Tampilan Pengumuman di Website KJMU..... 57
Gambar 4. 5 Tampilan Pengumuman di Instagram KJMU 57
Gambar 4. 6 Membuka situs resmi pendaftaran KJMU 58

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Data Penerima KJMU 1
Bagan 1. 2 Alokasi Anggaran KJMU 2

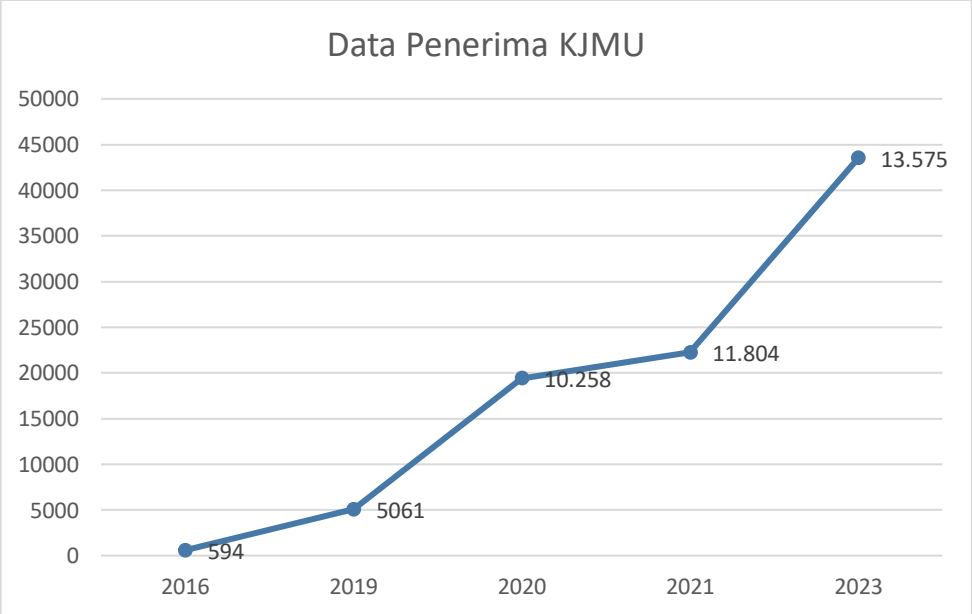
BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Ditinjau berdasrkan Peraturan Gubernur (PerGub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2016 menjelaskan bahwasannya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berbentuk pemberian bantuan biaya untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan bagi calon atau yang sudah menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan mempunyai potensi akademik yang baik dalam meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan dibiayai penuh oleh dana yang berasal dari APBD Provinsi Jakarta. Program ini diberikan kepada siswa lulusan SMA yang sebelumnya telah menjadi penerima tetap Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau yang sebelumnya bukan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)

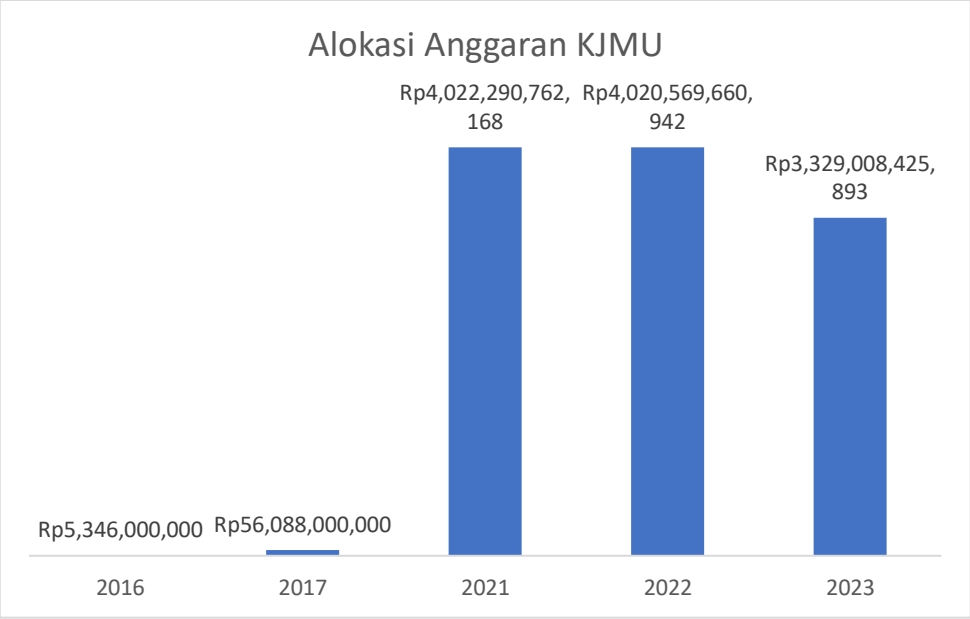
Bagan 1. 1 Data Penerima KJMU



Sumber: Data Penerima KJMU dilansirkondisi dari Satu Data Indonesia

Tahun 2016 merupakan awal tahun peluncuran program bantuan sosial KJMU ini, yang di mana sebanyak 594 mahasiswa menjadi penerima bantuan sosial KJMU. Selanjutnya, pada 3 tahun berikutnya, penerima bantuan sosial KJMU ini mengalami kenaikan menjadi 5.061 penerima, dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2023 penerima KJMU saat ini telah mencapai 13.575 penerima. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh meluasnya cakupan penerima bantuan sosial, yang awalnya hanya diberikan kepada mahasiswa dari Perguran Tinggi Negeri (PTN), kini merambah ke mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga bisa mendapatkan bantuan sosial ini. Berdasarkan data dari website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta (2024), terdapat 110 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 14 Perguruan Tinggi Swasta yang bekerja sama dalam program KJMU oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

Bagan 1. 2 Alokasi Anggaran KJMU



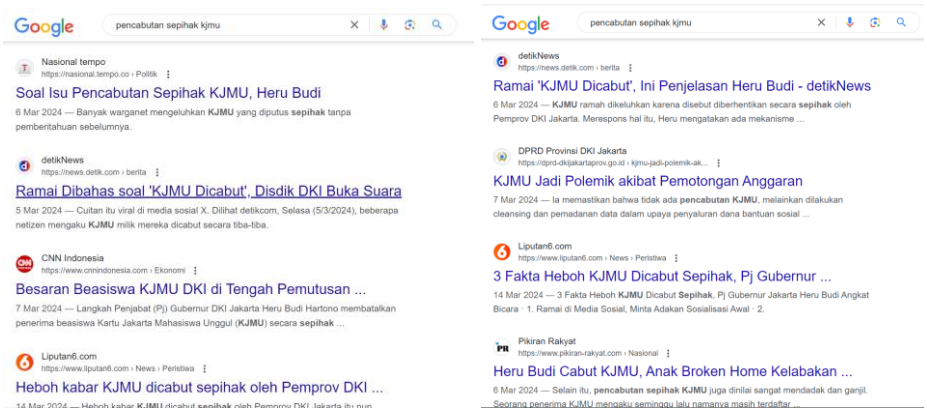
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta

Besaran anggaran yang dialokasikan untuk program bantuan sosial KJMU menunjukan komitmen Pemerintah Provinsi Jakarta dalam mendukung akses pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2023 dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp11.433.392.849.003. Pada

tahun pertama program KJMU, Pemerintah Provinsi Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp 5.346.000.000. Kemudian pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jakarta menaikan jumlah alokasi dananya menjadi Rp 56.088.000.000 dan pengalokasian dana terbesar ada pada tahun 2021 yang di mana mencapai Rp 4.022.290.762.168. Namun, terjadi penurunan alokasi dana sejak tahun 2022 yang dimana alokasi dana tersebut menjadi Rp 4.020.569.660.942. Hingga pada tahun 2023, terjadi penurunan alokasi dana yang cukup signifikan hingga Rp 3.329.008.425.893. Penurunan tersebut disebabkan oleh perbedaan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi acuan dari alokasi dana tersebut. Peraturan Guberner tersebut ialah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 yang menjadi acuan alokasi dana pada tahun 2021, kemudian di tahun 2022 yang menjadi acuannya adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 dan ditahun 2023 yang menjadi acuannya adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023. Penurunan alokasi dana ini mencerminkan adanya perubahan kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur terbaru. Pergub tersebut menjadi dasar perubahan skema anggaran yang berdampak pada efektivitas dan keberlanjutan program KJMU.

Setelah melihat data alokasi dana yang cukup signifikan untuk program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ini, penting untuk dapat memahami manfaat yang diperoleh bagi para penerima bantuan sosial ini. Manfaat yang didapatkan antara lain bantuan pendanaan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), pembelian alat tulis, biaya transportasi, serta kebutuhan tempat tinggal selama menempuh pendidikan. Selain itu, dilansir dari *website* resmi Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jakarta (2024), Kartu Jakarta Mahasiswa Umum (KJMU) memiliki manfaat lain seperti peningkatkan akses dan harapan belajar di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.

Gambar 1. 1 Berita Polemik KJMU



Sumber: Google

Namun, di tengah pencapaian tersebut, sejumlah tantangan tata kelola mulai muncul dan menjadi sorotan publik, salah satu tantangan yang cukup menonjol adalah polemik terkait pencabutan secara sepihak program bantuan sosial tersebut. Ditinjau dari beberapa berita *online*, pada maret 2024 terjadi pencabutan secara sepihak terhadap sejumlah penerima KJMU yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Gambar 1. 2 Cuitan Akun Komunitas Mengenai Isu KJMU



Sumber: Akun X @timpenguinnas

Pemberitaan ini mulai ramai ketika salah satu cuitan pada halaman akun *X @timpenguinnas*, dalam cuitan tersebut pengirim pesan menjelaskan bahwa adanya polemik pencabutan bantuan sosial KJMU. Yang kemudian ceritanya ini menjadi banyak diperbincangkan, terutama pada sesama penerima KJMU yang memiliki permasalahan serupa di dalam kolom komentar pada postingan tersebut. Terhitung dari tanggal diunggahnya postingan hingga bulan Oktober 2024 ini, potingan ini telah dibaca oleh kurang lebih 3,5 juta, 457 komentar, 6,200 di-*retweet,* dan dibagikan sebanyak 12 ribu kali oleh pengguna *X.* Hal tersebut menandakan keresahan kolektif dari para penerima yang mengalami pencabutan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas, dan fenomena ini pun menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola program.

Selain polemik pencabutan bantuan sosial yang dilakukan secara sepihak yang dimana menjadi sorotan publik, implementasi program Kartu Jakarta Mahasiswa unggul (KJMU) juga dihadapkan pada berbagai permasalahan tata kelola yang mencerminkan rendahnya kualitas pelaksanaan program dalam menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas dan pemerataan. Permasalahan ini mengindikasikan belum optimalnya penyaluran bantuan secara tepat sasaran dan berkeadilan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah manipulasi data oleh calon penerima, persoalan

domisili luar jakarta oleh mahasiswa penerima dan keterlambatan pencairan dana.

Yang pertama mengenai praktik manipulasi data oleh calon penerima rekayasa dokumen agar dapat memenuhi syarat administratif. Mencakup manipulasi data pada Surat keterangan tidak mampu. Terdapat kasus ketidaksesuaian antara data pengajuan data dengan hasil verifikasi akhir, yang menunjukan lemahnya proses validasi oleh pihak penyelenggara program (Ayuningtyas, 2021). Disisi lain, rendahnya keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik terkait bantuan sosial juga menjadi penyebab penyalahgunaan kebijakan oleh pihak yang tidak berhak (Fitriani, 2017)

Kedua, permasalahan domisili yang menjadi hambatan dalam ketepoatan distribusi KJMU. Meskipun salah satu syarat utama penerima adalah berdomisili di DKI Jakarta, pada kenyatannya terdapat mahasiswa yang secara administratif terdaftar bertempat tinggal di Jakarta tetapi secara faktual tinggal di luar wilayah tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, menunjukan adanya calon penerima yang menumpang alamat pada kerabat demi kelulusan verifikasi (Nanang Suparman, 2022). Inkosisten data antara Dinas Pendidikan, Dinas kependudukan dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Rauzalia, 2023).

Permasalahan KJMU tidak hanya itu, keterlambatan dan inkosisten waktu pencairan dana juga menjadi isu yang sering dikeluhkan oleh mahasiswa penerima program KJMU. Dana yang seharusnya dicairkan secara rutin dan terjadwal setiap semester seringkali mengalami keterlambatam, baik dalam proses administrasi maupun distribusinya. Kondisi ini menyulitkan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan akademik seperti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya hidup dan pembelian perlengkapan studi. Penyaluran dana KJMU kerap tidak tepat waktu dan belum sepenuhnya transparan yang dimana menyebablan kebingungan di kalangan penerima (Riza, 2024). Selain itu terdapat beberapa mahasiswa yang menghadapi perbedaan informasi antara pihak universitas, Dinas Pendidikan, dan P4OP mengenai jadwal pencairan, yang

menimbulkan ketidakpastian dan mempengaruhi stabilitas ekonomi mahasiswa (Yusman, 2021)

Permasalahan tata kelola tidak hanya dialami oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dalam program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Hasil penelitian lain terkait permasalahan tata kelola juga pernah dialami oleh (Gemiharto, 2017), beliau menjabarkan temuannya berupa tata kelola bantuan sosial di Bandung menghadapi berbagai rintangan, dimulai dari proses administrasi yang manual dan tertutup, lemahnya pertanggungjawaban dan perencanaan, hingga adanya penyalahgunaan dana melalui politisasi bantuan menjelang pilkada. Namun, ada upaya inovatif seperti digitalisasi bantuan melalui sistem *online* yang mulai digerakkan guna mendorong keterbukaan dan mencegah praktik korupsi. Permasalahan lain pun dikaji oleh (Purwanti, 2023), beliau memfokuskan kajiannya pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial, khususnya pada tingkat lokal deperti RT. Mereka meunjukan bahwa prinsip akuntansi mampu untuk meniingkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada tata kelola beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul menggunakan teori *Governability* oleh Jan Kooiman. Dengan demikian, penelitian ini akan menambah studi terdahulu mengenai tata kelola beasiswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan bagaimana tata Kelola Program bantuan sosial KJMU Provinsi Jakarta yang nantinya akan dianalisis sesuai dengan teori *Governability* oleh Jan (Kooiman J, 2003) Maka dari itu, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tata Kelola Program Kartu Jakata Mahasiswa Unggul (KJMU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana tata kelola Program KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) dengan perspektif *Governability*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, bisa ditarik tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola Program KJMU dalam perspektif Governability.

D. Manfaat penelitian

Mengenai manfaat yang didapat dari peneletian ini sebagai berikut:

1. **Bagi penulis**

   Penelitian ini akan memberikan kesempatan bagi penulis untuk pengembangan pemahaman yang lebih luas tentang teori *Governability* dalam tata kelola.

2. **Bagi Akademisi**

   Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis terkait tata kelola, terutama dalam teori *Governability*. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi literatur dalam pengelolaan pemerintah daerah.

3. **Bagi pemangku kepentingan**

   Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam terkait efektivitas tata kelola bantuan sosial, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap pengelolaan dana bantuan sosial.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kajian mengenai Tata Kelola Bantuan Sosial

Kajian mengenai tata kelola bantuan sosial telah dilakukan oleh (Gemiharto, 2017) dan penelitian selanjutnya oleh (Purwanti, 2023).

Dalam kajian tata kelola bantuan sosial, pertama kali dilakukan oleh (Gemiharto, 2017) yang memfokuskan kajiannya dalam tata kelola bantuan sosial di bandung yang mengalami banyak rintangan, dimulai dari proses administrasi yang manual dan tertutup, lemahnya pertanggungjawaban dan perencanaan, hingga penyalahgunaan dana melalui politisasi bantuan menjelang Pilkada. Namun, upaya inovatif seperti digitalisasi bantuan melalui sistem *online* mulai dilakukan guna mendorong keterbukaan dan mencegah praktik. Selanjutnya, ada kajian dari (Purwanti, 2023) yang telah melakukan penelitian dan memfokuskan kajiannya dalam pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial, terkhusus pada tingkat lokal seperti RT. Mereka menunjukan bahwa pelatihan dan sosialisasi mengenai pelaporan keuangan berbasis prinsip akuntansi mampu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial. Sosialiasi ini tidak hanya meningkatkan kompetensi pengurus RT, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi.

2. Kajian mengenai Bantuan sosial KJMU

Berikutnya ada kajian yang membahas tentang Beasiswa KJMU yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2021), Sagita (2021), Yusman (2021), Riza (2024) dan Angelina (2024) Kajian yang pertama oleh Ayuningtyas (2021) yang dimana memaparkan bahwa adanya indikasi pada tidak sesuainya penerima beasiswa ini dengan standar yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Yang kedua oleh Sagita (2021), program beasiswa KJMU di UIN Jakarta sudah berjalan baik namum ada beberapa sisi yang harus diperbaiki seperti waktu turunnya dana beasiswa, lalu pihak universitas mengalami kurang komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan forum KJMU. Yang ketiga karya oleh Yusman (2021) menjelaskan bahwa adanya permasalahan seperti dana yang disalahgunakan, terjadinya keterlambatan pencairan dana yang terjadi di

UNJ. Keempat, karya oleh Riza (2024) menjelaskan bahwa rekonstruksi kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dikarenakan berhasilnya tujuan dari program seperti meningkatnya minat bantuan KJMU yang terjadi di Universitas Nasional. Terakhir, karya oleh Angelina (2024) memaparkan bahwa ada pengaruh besar gaya hidup konsumtif dengan mahasiswa penerima bantuan dana KJMU yang dimana mereka memprioritaskan kebutuhan sekunder dibanding primer.

3. Kajian mengenai *Governability*

Kajian mengenai *Governability* telah dilakukan oleh Kübler, Rochat, Woo, & Heiden (2019), Acharya (2018), Kooiman, Bavinck, Chuenpagdee, Mahon, & Pullin (2008) Kübler, Rochat, Woo, & Heiden, (2019) telah memfokuskan penelitiannya pada memperkuat tata kelola daripada memperdalam demokrasi dimana hasil dari penelitian ini perluasan tata kelola pada pemerintahan yang partisipatif didorong oleh adanya agenda guna meningkatkan tata kelola pemerintah dalam konteks konflik dengan disertai kepentingan oleh suatu kelompok yang lebih kuat. Selanjutnya hasil kajian dari karya Acharya (2018) yang memfokuskan kajiannya pada pemerintahan ke tata kelola dan tata kelola pemerintah di daerah Nepal. Di mana dalam penelitian ini menghasilkan bahwasanya pemerintahan lokal di Nepal masih banyak yang harus dilakukan guna memastikan bahwa pemerintah daerah tersebut mempunyai kapasitas yang relevan untuk merancang dan menyediakan layanan serta infrastruktur bagi masyarakat setempat. Yang terakhir terdapat kajian dari Kooiman, Bavinck, Chuenpagdee, Mahon, & Pullin (2008) yang kajiannya berfokus pada tata kelola interaktif dan tata kelola pemerintahan. Kajian ini menjabarkan bahwa tata kelola diartikan sebagai sistem di dalam masyarakat seperti sistem di dalam perusahaan. Penilaian pada tata kelola tersebut didekati dengan mengenai keseluruhan yang terdiri dari 3 komponen analitis yaitu;

sistem yang akan diatur, sistem yang mengatur dan interaksi tata kelola diantara mereka.

Namun, hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara eksplisit menggunakan pendekatan *governability* yang dikemukakan oleh Jan Kooiman untuk menganalisis program bantuan sosial daerah seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Padahal, pendekatan ini menawarkan kerangka yang komprehensif dalam memahami dinamika tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, struktur, dan proses dalam sistem kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perspektif tata kelola yang menekankan pada keterkaitan antara kapasitas pemerintahan, keberdayaan masyarakat penerima manfaat, serta kompleksitas konteks sosial-politik yang melingkupi pelaksanaan program. Dengan demikian, pendekatan *governability* memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap efektivitas, legitimasi, dan responsivitas program KJMU dalam kerangka tata kelola modern.

F. Teori Penelitian

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menurut pandangan Sugiyono (2012:38) merupakan pemaknaan dari konsep yang dipakai, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.

a. Tata Kelola

Menurut Kooiman J, 2003), tata kelola dapat diartikan sebagai proses dari interaksi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta di dalam pembuatan suatu kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya tata kekola dalam kebijakan itu menekankan kerjasama dari beberapa pihak atau multi-pihak, akuntabilitas, serta efektivitasnya dari implementasi kebijakan.

b. Bantuan Sosial

Menurut (Samputra, 2019), bantuan sosial merupakan bentuk intervensi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Bantuan ini dapat berupa uang, barang atau layanan yang disalurkan secara selektif kepada kelompok miskin dan rentan. Tujuan utama dari bantuan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan dan daya tahan ekonomi kelompok penerima.

1. Teori *Governability*

Teori yang relevan dengan penelitian ini, yaitu teori *Governability* oleh Jan Kooiman (2003). Kooiman menjelaskan *Governability* sebagai konsep dari multidimensional yang meliputi interaksi dari berbagai aktor dan sistem yang terlibatnya dalam proses tata kelola tersebut. Pemerintahan, tata kelola, dan kemampuan untuk dikelola (*Governability*) itu sendiri memiliki sifat atau konsep yang sangat berdinamika, kompleks, dan beragam. Serta, kemungkinan besar memang harus memiliki sifat-sifat atau konsep-konsep tersebut (Kooiman J, 2003).

a. Dinamika

Menurut (Kooiman J, 2003), dinamika itu berarti sistem yang berpindah dari satu keadaan atau tempat ke keadaan lain, yang didorong, ditarik, atau dipengaruhi oleh kekuatan alam, teknologi, dan sosial. Dinamika ini juga selalu melibatkan interaksi. Kooiman juga melihat bahwa tata kelola merupakan proses yang berdinamika, artinya bisa terus berubah. *Governability* juga memerlukan adaptasi dari tiap-tiap perubahan yang terjadi. Perubahan ini bisa disebabkan oleh perubahan politik, lingkungan sosial dan lain sebagainya sehingga perlu ditangangi oleh tata kelola yang fleksibel dan responsif.

Dalam konteks penelitian tata kelola dari Program KJMU

Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta, konsep dinamika ini dapat digunakan guna memahami perubahan-perubahan yang terjadi, serta tantangan yang terus akan berkembang dalam pelaksanaan dan pengelolaan dari Program Beasiswa KJMU Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta tersebut. Perubahan ini bisa disebabkan oleh perubahan politik, lingkungan sosial dan lain sebagainya sehingga perlu ditangani oleh tata kelola yang fleksibel dan responsif.

b. Kompleksitas

Governability bersifat kompleksitas pada sistem sosial dan politik, serta ekonomi yang sedang dikelola. Namun, kompleksitas tidak ada hubungannya dengan jumlah atau variasi dari subsistem yang dimaksud, melainkan tingkat kompleksitas dalam cara mereka berinteraksi (Kooiman J, 2003). Dalam sistem yang kompleks ini melibatkan banyak aktor, isu, serta kepentingan, sehingga memerlukan pendekatan tata kelola yang kompleks juga. Jadi, semakin banyak dimensi dan variabel di dalam suatu sistem, akan menyebabkan banyak interaksi yang dibuat, sehingga akan semakin sulit juga untuk dikelola secara lebih efektif.

Konsep kompleksitas dalam penelitian ini, mengacu pada interaksi dari aktor atau subsistem yang harus dikelola secara harmonis. Kompleksitas ini akan muncul jika ada keterlibatkan antara lembaga, perbedaan kepentingan, serta dalam menyeimbangkan transparansi, efesiensi, dan keadilan. menurut Luhman (1970) (dalam Kooiman, 1993) cara untuk mengatasi kompleksitas adalah dengan cara memilih dan mengatur cara interaksi dari aktor atau subsistem yang dimaksud.

c. Keragaman

Dalam konteks ini, konsep keragaman menyoroti pada aktor-aktor dalam sisitem ini. Tidak hanya berfokus pada aktor yang

terlibat, namun keragaman dalam hal ini merujuk pada perbedaan dari tujuan dan maksud dari kepentingan mereka. Untuk memahami tata kelola, kita mempertimbangkan keberagaman dan aktor serta tujuan yang ada di dalamnya.

Konsep keberangaman dalam konteks penelitian tentang tata kelola Program KJMU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akan menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai aktor, kepentingan, dan tujuan dalam pengelolaan program yang dimaksud. Sehingga, konsep ini akan menghasilkan tata kelola yang efektif jika mampu mengelola keberagaman ini dengan baik.

Penerapan teori *Governability* oleh Kooiman ini jika ditinjau untuk melihat tata kelola KJMU akan menunjukan pentingnya keragaman, kompleksitas, dan dinamika yang dihasilkan yang kemudian tata kelola ini beradaptasi terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Program beasiswa KJMU ini membutuhkan tata kelola yang transparan serta akuntabel, dengan berkolaborasi antar sektor untuk menjamin keberlangsungan dan keefektivan atas pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berhak menerimanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami proses, mekanisme dan dinamika tata kelola Creswell (2014) dan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini memiliki fokus pada pengamatan terhadap tata kelola beasiswa, sehingga memungkinkan peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai, hambatan, keberhasilan serta Solusi yang diterapkan oleh institusi terkait dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada selama berjalannya program tersebut Yin (2018)

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data yang bersumber dari data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Pada penelitian yang akan dilakukan ini penulis akan mendapatkan data primer langsung dari lapangan, dengan melaksanakan wawancara secara langsung kepada narasumber. Pada penelitian ini, penulis akan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang terlibat dalam tata kelola dan pelaksanaan beasiswa KJMU yang mencakup pejabat pada unit Pelaksana teknis Dinas Pendidikan Jakarta dan pejabat pada P4OP.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2021) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian. Tujuan dilakukannya sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data. Oleh karena itu, maka penulis akan menggunakan beberapa Teknik dalam mengumpulkan data, yaitu

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Adler & Adler (1987:389) dalam Hasanah (2016) Teknik observasi pada dasarnya adalah kegiatan yang menggunakan panca indera, yaitu melalui penciuman, pendengaran penglihatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini teknik observasi dilakukan dengan mengamati

b. Wawancara

Menurut Safitri (2021) wawancara merupakan teknik penggalian data dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data melalui pernyataan lisan para informan terkait fokus kajian penelitian. Teknik ini menekankan pada proses komunikasi antar

dua orang yang biasa dilakukan dengan melakukan tanya jawab. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber yng terlibat dalam tata kelola KJMU, seperti pejabat pada Dinas Pendidikan Daerah Khusus Jakarta dan P4OP, pengelola teknis program dan penerima. Proses wawancara ini digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan program beasiswa KJMU.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, data didapatkan dari banyak sumber dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan dilakukan secara berkelanjutan sampai data tersebut jenuh. Dengan pengamatan yang berkelanjutan, maka data yang diperoleh sangat bervariasi. Menurut Miles dan Hubermas (2009) dalam Safitri (2021) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian yaitu reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Melihat pada Miles dan Hubernas (2009) metode analisis data dalam penelitian kualitatif adalah

a. Reduksi Data

   Proses reduksi data adalah memilah dan menyederhanakan hal hal pokok agar dapat meningkatkan efisiensi pengambilan data, meminimalisir data data yang tidak diperlukan dan memudahkan ketika menganalisis data tersebut.

b. Paparan Data

   Proses ini dilakukan dengan melakukan penyajian data dari hasil pencarian data yang sudah dilakukan. Proses ini dilakukan agar analisis data yang dilakukan dapat berjalan dengan jelas terstuktur dan mudah dipahami. Tetapi dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dengan berbentuk teks berbentuk naratif

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini adalah fase terakhir dalam proses analisis data. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi data ini adalah sebuah cara untuk memahami dan mencari pembuktian ulang data yang sudah diperoleh dari tahap tahap yang sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam proposal ini akan diurutkan menjadi 6 Bab. Sistematika penulisan dari proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisain proposal.

BAB II *Governability* Oleh Jan Kooiman

Pada bab ini, peniliti akan memberikan gagasan teori yang akan dikaji lebih lanjut mengenai tinjauan tata kelola oleh Jan Kooiman.

BAB III Gambaran Umum Tata Kelola Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan sejumlah aspek yang meliputi tata kelola sebuah kebijakan program beasiswa KJMU.

BAB IV Tata Kelola Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan seluruh hasil dari tata kelola program beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

BAB V Penutup

Pada bab terakhir ini, peneliti akan memberika saran serta kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II
TATA KELOLA KJMU (*Governability* – Jan Kooiman)

A. Definisi *Governability*

Konsep *governability* mulai mendapat perhatian dari kalangan akademisi sejak dekade 1970-an. Di antara tokoh-tokoh yang mengangkat isu ini adalah Samuel Huntington di Eropa, Michel Crozier di Amerika Serikat, dan Joji Watanuki di Jepang. Ketiganya menggunakan konsep tersebut untuk menganalisis situasi pemerintahan dan demokrasi di negara masing-masing pada masa itu. Latar belakang pemikiran mereka didorong oleh munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, yang disebabkan oleh melemahnya kapasitas institusional (Michel Crozier, 1975). Melemahnya institusi ini tidak berarti bahwa mekanisme demokrasi berhenti berjalan, melainkan para aktor yang berada dalam institusi tersebut tidak mampu menjalankan fungsi pengambilan keputusan secara efektif. Kondisi inilah yang mereka identifikasi sebagai krisis *governability*. Meskipun tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah tersebut, *governability* dapat dipahami sebagai kemampuan suatu pemerintahan dalam mengelola tata kelola negara, mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif (Tryatmoko, 2016). Menurut (Mayntz, 1996) yang juga menjelaksan tentang *governing failures* dan *Governability*, hampir senada dengan Crozier, Mayntz berangkat dari kondisi eropa tahun 1970 hingga 1980, konsep *governing failures* didalam konsep miliknya disebut sebagai *unGovernability* untuk menjelaskan tentang gambaran kegagalan dari negara modern yang menekankan pada tiga hal yaitu regulasi, krisis *welfare state*, dan penyebab *governing failures.*

Menurut pandangan Mayntz, konsep *ungovernability* mencakup tiga faktor utama. Pertama, faktor sosial yang berkaitan dengan kegagalan proses sosialisasi serta menghilangnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Kedua, faktor politik yang tercermin dari ketidakefektifan sistem kepartaian dalam mewakili aspirasi masyarakat dan membangun konsensus kolektif. Ketiga, kegagalan pemerintah dalam merespons meningkatnya

ketidakpercayaan publik serta ketidaksesuaian pandangan antara pemerintah dan masyarakat luas. Sedangkan (Kooiman J, 2003) menjelaskan mengenai *Governability* sebagai kemampuan pemerintah. Berbeda dengan Myantz, Kooiman memberikan penjelasan lebih terperinci bahwa *Governability* merupakan suatu proses keseimbangan yang permanen diantara *governing needs* dan *governing capacities*. Lebih lanjut *needs* bukan saja apa yang ada dimasyarakat dan capacity bukan sekedar pemerintah saja, melainkan dalam kadar, pola, dan aktornya bisa dilihat dalam waktu bersamaan sebagai publik dan privat, sosial politik, negara dan masyarakat yang memiliki relasi ketergantungan. Hubungan yang terbentuk dan terpolarisasi antara kapasitas negara dengan permintaan sosial yang telah disesuaikan secara terpadu sulit untuk saling menguntungkan dari kebutuhan dan kapasitas sosial politiknya. Lebih lanjut, (Kooiman J, 2003) Dalam masyarakat modern, terdapat tiga karakteristik mendasar yang tak terpisahkan, yakni kompleksitas, keragaman, dan dinamika. Ketika ketiga unsur ini dipahami secara serius, kita dapat mulai merumuskan pendekatan konseptual untuk mengelola masyarakat melalui mekanisme pemerintahan yang lebih modern. Artinya, kompleksitas, keragaman, dan dinamika tidak hanya diposisikan sebagai tantangan yang perlu diatur, tetapi juga sebagai komponen utama dalam desain model pemerintahan kontemporer. Tingkat keteraturan dalam sistem sosial-politik baik sebagai masukan maupun keluaran dari proses pemerintahan sangat bergantung pada bagaimana ketiga karakteristik tersebut ditangani sebagai bagian dari tugas pemerintahan. Tanggung jawab atas tugas-tugas ini tidak sepenuhnya berada di tangan aktor atau otoritas publik semata, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif dalam sistem sosial-politik secara keseluruhan, yang mencakup peran dari sektor publik, swasta, maupun entitas campuran (Kooiman J, 2003).

Konsep dasar mengenai *Governability* dimulai dari konsep *interacive governance.* Menurut (Kooiman J, 2003) *interactive governance* merupakan keseluruhan interaksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan untuk menciptakan peluang-peluang sosial, termasuk perumusan

dan penerapan prinsip-prinsip yang memandu interaksi-interaksi tersebut dan kepedulian terahadap lembaga-lembaga yang memungkinkannya. Kata sifat "kemasyarakatan" mengacu pada segala sesuatu yang memiliki dimensi umum atau publik. Kata sifat ini berlawanan dengan kata "pribadi". Definisi ini juga mencakup referensi ke institusi dan prinsip-prinsip karena mereka dianggap penting untuk setiap interaksi pemerintah. Pengaturan pemerintah yang tidak memiliki dasar normatif akan mengalami ketidakefektifan dan ketidakstabilan dalam jangka panjang.

Secara teoritis, masyarakat terdiri dari sejumlah besar aktor pengelola yang tindakannya dibatasi sekaligus difasilitasi oleh struktur-struktur tertentu. Dalam perspektif ini, aktor dipahami sebagai setiap entitas sosial yang memiliki agensi atau kemampuan untuk bertindak. Aktor dapat berupa individu, kelompok, asosiasi, pemimpin, korporasi, hingga lembaga nasional maupun internasional. Sementara itu, struktur merujuk pada kerangka sosial yang menjadi wadah bagi para aktor untuk beroperasi, kerangka ini dapat membatasi sekaligus memperluas ruang gerak mereka, sehingga keberadaannya perlu diperhitungkan secara serius. Struktur tersebut mencakup unsur-unsur budaya, sistem hukum, norma dan perjanjian, kondisi material, serta kapabilitas teknologis yang tersedia. Dalam dinamika sosial, para aktor senantiasa berperan dalam membentuk dan mengubah struktur-struktur ini, namun di sisi lain juga dipengaruhi olehnya. Oleh karena itu, analisis terhadap *interactive governance* dan *governability* menuntut perhatian yang seimbang terhadap kedua dimensi tersebut: agensi aktor dan batasan struktural. Dalam masyarakat modern, kekuatan utama justru terletak pada keanekaragaman, kompleksitas, dan dinamika yang senantiasa berkembang dalam berbagai tingkatan dan skala. Keanekaragaman menuntut pengakuan terhadap karakteristik unik dan beragam dari para aktor serta entitas sosial lainnya. Meskipun menjadi sumber kreativitas dan inovasi, keanekaragaman juga mengandung potensi risiko terjadinya disintegrasi sosial. Sementara itu, kompleksitas menekankan pentingnya memahami struktur masyarakat, termasuk pola saling ketergantungan dan keterkaitan antar unsur di dalamnya.

Ketika dinamika sistem diperkenalkan, perhatian diarahkan pada pola-pola perubahan dan perkembangan yang bersifat teratur namun seringkali disertai dengan ketegangan. Dinamika ini membuka ruang bagi transformasi, namun juga dapat menimbulkan dampak yang mengganggu stabilitas. Skala dipahami sebagai dimensi spasial, temporal, kuantitatif, atau analitis yang digunakan untuk mengamati atau mengukur suatu fenomena, sedangkan level merujuk pada unit analisis yang berada dalam posisi tertentu pada skala tersebut. Baik skala maupun level memiliki peran penting dalam mendukung keperluan analitis maupun pengembangan kerangka teoritis.

Ciri-ciri masyarakat yang telah diuraikan sebelumnya secara konsisten menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Kedua aspek ini yaitu tantangan dan peluang pada dasarnya bersifat kompleks, dinamis, dan beragam, mencerminkan kekuatan serta kelemahan sistem sosial. Mereka muncul dalam berbagai tingkatan dan skala, memperlihatkan betapa eratnya keterkaitan antara unsur-unsur dalam sistem sosial dan lingkungan alam. Keragaman, kompleksitas, dan dinamika hubungan antarkomponen sistem tersebut turut menciptakan ketidakpastian, yang menjadi karakter inheren dalam tatanan sosial-ekologis. Konsekuensi dari kondisi ini tidak hanya berdampak pada para aktor yang saling berinteraksi dalam masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara sistem masyarakat itu sendiri dipelajari dan dipahami. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat reduksionis yang hanya berfokus pada aktor secara individual maupun pada interaksi yang terisolasi, karena gagal menangkap kompleksitas dalam kerangka sistemik yang lebih luas (Mayntz, 2004). Tetapi pendekatan holistik murni, di mana sistem sebagai unit analisis juga tidak berfungsi.

Pemerintah, yang diperintah, dan interaksi mereka, semuanya berkontribusi pada *Governability* masyarakat pada tingkat apa pun. Dengan kata lain, *Governability* tidak dianggap sebagai sesuatu yang terutama disebabkan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memerintah. Dalam pandangan (Kooiman J, 2003) *Governability* adalah kualitas entitas masyarakat secara keseluruhan, dan mereka yang berpartisipasi di dalamnya atau didefinisikan

sebagai kualitas keseluruhan untuk tata kelola entitas masyarakat mana pun. Kemampuan mengatur seperti itu terus menerus berubah sebagai respons terhadap tantangan eksternal dan internal, dan juga oleh tindakan pemerintahan. Apa yang mungkin memiliki *Governability* yang tinggi pada waktu dan tempat tertentu, mungkin rendah pada waktu dan tempat yang lain. Hal ini sering kali meningkatkan ketidakpastian sehubungan dengan *Governability* entitas masyarakat dalam kualitas dan bagian manusia serta alamnya (Kooiman J, 2003)

Tampaknya logis bagi *interactive governance* untuk mendefinisikan sistem yang berinteraksi (*Governing Interaction*) di samping sistem yang mengatur (*Governing System*) dan sistem yang akan diatur (*System To Be Governed*), yang menghubungkan mereka. Jadi (Kooiman J, 2003) memperluas definisi *Governability* menjadi kualitas keseluruhan untuk tata kelola entitas atau sistem masyarakat yang terdiri dari System *To Be Governed*, *Governing system* dan *Governing Interaction*. konsep *Governability* sebagai keseluruhan yang terintegrasi, sambil menjelaskan bahwa masing-masing komponennya (SG, GS dan GI) memiliki dasar konseptual sendiri. Ketiganya memiliki kualitas sistem dan *Governability* sendiri, seperti batas, lingkungan, perbedaan, dinamika, kompleksitas, skala dan sistem dalam sistem (*nestedness*) Beriku ini penjelasan lebih jelas mengenai entitas-entitas tersebut:

1. ***Governability* dan sistem yang akan diatur (*System To Be Governed*)**

   Sifat dan karakteristik pemerintahan memegang peranan krusial dalam konteks *governability*, mengingat pemerintah diasumsikan sebagai aktor utama yang berkontribusi terhadap baik permasalahan maupun peluang dan batasan dalam tata kelola. Untuk menganalisis dan mengevaluasi *governability* suatu pemerintahan, variabel seperti keragaman, kompleksitas, dinamika, dan skala menjadi elemen analitis yang bersifat universal. Meskipun faktor tambahan seperti kerentanan dan risiko juga memiliki pengaruh, peranannya cenderung lebih signifikan dalam konteks lokal. Fokus utama dalam kajian terhadap pemerintahan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan sejauh mana

sebuah pemerintahan dapat dikatakan *governable* atau sebaliknya. Hal ini menuntut penetapan batasan dan identifikasi elemen-elemen yang dianggap relevan dalam mengkonseptualisasikan pemerintahan dari sudut pandang *governability*. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah dengan mengadopsi teori atau kerangka konseptual yang bersifat interdisipliner, mengingat kompleksitas pemerintahan menuntut pemahaman yang luas untuk mengidentifikasi potensi-potensi faktor *governability*. Alih-alih merancang kerangka teoritik yang benar-benar baru, pendekatan yang lebih realistis dan efisien adalah memanfaatkan kerangka konseptual yang telah ada, asalkan kerangka tersebut memiliki kapasitas analitis yang memadai untuk mengungkap dimensi-dimensi *governability*.

2. *Governability* dan sistem yang mengatur (*Governing System*)

Governability dari sudut pandang GS adalah kapasitas untuk mewujudkan, mengatur dan melaksanakan kegiatan tata kelola dalam menghadapi keanekaragaman, kompleksitas dan dinamika masyarakat dan alam. Karakteristik penting dari kerangka kerja ini adalah definisinya yang luas tentang sistem pemerintahan termasuk pasar dan masyarakat sipil di samping negara sebagai bagian dari GS (Kooiman J, 2003). Dalam konsep ini terdapat pemerintah dan entitas sebagai berikut:

a. Pertama, negara tetap menjadi entitas yang paling sentral dan berada dimana-mana dalam mengatur kehidupan masyarakat. Peranannya mencakup berbagai tingkat dari lokal hingga internasional dengan pendekatan yang beragam serta kompleks. Dalam praktiknya, asumsi mengenai negara sebagai suatu lembaga masyarakat yang homogen dan diatur oleh seperangkat aturan yang seragam kini semakin tidak memadai. Sebaliknya, diperlukan model-model konseptual alternatif yang mengakomodasi variasi, diferensiasi, serta tingkat kemandirian dan interdependensi tertentu antar entitas. Transformasi tersebut mencerminkan dinamika negara modern, di

mana meskipun dalam beberapa aspek negara tampak mengalami kemunduran, pada saat yang sama intensitas aktivitasnya justru meningkat di sektor lain. Namun demikian, tidak ditemukan indikasi bahwa peran utama negara dalam proses pengambilan keputusan telah mengalami pelumpuhan secara signifikan.

b. Kedua, Pasar, sebagai institusi governance, juga memiliki fitur-fiturnya sendiri yang beragam, kompleks dan dinamis. Pandangan (Williamson, 1975) tentang governance, di mana ekonomi kelembagaan menyediakan kerangka kerja kelembagaan secara luas yang terdiri dari pasar, hierarki dan bentuk campuran, di mana transaksi disalurkan. Pandangan ini berarti menjauh dari hukum ekonomi umum yang menjelaskan interaksi pasar, tetapi menunjukkan beberapa aspek governance mereka. Di samping itu, bidang sosiologi ekonomi merupakan kontributor utama untuk wawasan tentang pasar sebagai lembaga pemerintahan dan karakteristik masyarakatnya dalam arti luas.

c. Ketiga, Peran *governance* dalam masyarakat sipil dapat dipahami melalui eksistensi institusi-institusi sosial yang berada dalam apa yang disebut sebagai '*domain publik'*. Domain ini mencakup berbagai bentuk interaksi antar aktor seperti media, kelompok kepentingan, institusi akademik, dan gerakan sosial yang berperan dalam mendiskusikan, mengkritisi, serta menggerakkan kekuatan-kekuatan pemerintahan yang bersifat lebih informal. Fenomena hibridisasi antarlembaga sosial juga semakin mendapat sorotan, khususnya ketika negara mulai menarik diri dari beberapa fungsi pelayanan publik dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Dalam konteks ini, muncul perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan swasta maupun bentuk kepemilikan campuran. Bagi kajian *governability*, keberadaan institusi hibrida dan pola institusionalisasi yang terbentuk di persinggungan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil menjadi sangat signifikan. Dinamika ini

menimbulkan tantangan analitis yang kompleks dalam upaya mengevaluasi kapasitas tata kelola secara keseluruhan.

3. Governability dan sistem yang berinteraksi (GI)

Interaksi antara SG dan GS memiliki peran yang sangat krusial dalam konteks tata kelola, dan oleh karena itu menjadi aspek penting dalam kajian *governability*. Masyarakat sebagai pihak yang diperintah berupaya untuk mempengaruhi otoritas yang memerintah melalui partisipasi aktif, sementara entitas pemerintahan berusaha membentuk perilaku masyarakat melalui kebijakan dan mekanisme manajerial yang mereka terapkan. Dalam praktik *governance* modern, interaksi antara kedua pihak ini berlangsung dalam berbagai bentuk yang sangat beragam. *Governance interactions* (GI) pada dasarnya mencakup pola hubungan yang bersifat vertikal ke bawah, vertikal ke atas, maupun horizontal yang dalam banyak kasus saling terjalin erat hingga membentuk konfigurasi yang sirkular. Semakin terstruktur dan cermat pola-pola interaksi ini dirancang, semakin besar kemungkinan mereka membentuk karakteristik sistemik yang khas dan stabil dalam kerangka tata kelola.

Tindakan Pendekatan *top-down* atau bersifat otoritatif telah banyak dibahas dalam kerangka GS. Namun demikian, tidak secara otomatis dapat diasumsikan bahwa para aktor dalam GS memiliki kemauan atau kapasitas untuk terlibat dalam pola partisipasi vertikal ke atas maupun horizontal. Partisipasi publik atau keterlibatan warga negara memang telah lama menjadi elemen sentral dalam teori dan praktik institusi demokrasi, khususnya pada level pemerintahan lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, dorongan baru terhadap analisis partisipasi muncul melalui pengaruh gagasan dan praktik demokrasi langsung, partisipatoris, dan deliberatif, serta upaya pemberdayaan dan inklusi sosial. Secara umum, partisipasi warga dalam urusan publik dianggap membawa berbagai manfaat, antara lain peningkatan pembelajaran kolektif, integrasi sosial, perbaikan kualitas hasil kebijakan, pemahaman yang lebih mendalam, serta penguatan kontrol dan akuntabilitas. Namun demikian, berbagai keterbatasan dan risiko juga diakui, seperti ketidakefisienan, ketidakmatangan politik, ketidakrealisan, gangguan terhadap proses, potensi

dampak negatif, konsumsi waktu dan biaya yang tinggi, konflik, penurunan kualitas hasil, hingga hilangnya kendali terhadap arah kebijakan.

Namun, tidak semua interaksi pemerintahan memiliki intensitas yang sama. Beberapa di antaranya adalah diskusi, sementara yang lainnya berperan dalam pengambilan keputusan. Bahkan, dapat menyusun skala intensitas yang bervariasi dari 'ringan' hingga 'berat'. Berikut ini adalah contoh-contoh yang mengilustrasikan poin-poin pada skala tersebut:

a. Pertama, Musyawarah secara bertahap telah menempati posisi kunci dalam diskursus mengenai demokrasi interaktif, dan kini dipandang sebagai elemen pelengkap yang esensial bagi sistem demokrasi elektoral yang bersifat konvensional. Gagasan tentang demokrasi deliberatif didorong sebagai mekanisme yang mampu menjembatani perbedaan pandangan, sekaligus menghasilkan kebijakan yang lebih legitim, rasional, dan adil. Meski demikian, penting untuk tetap mewaspadai adanya agenda tersembunyi, tindakan strategis yang manipulatif, motivasi yang tidak semata-mata ditujukan untuk membujuk secara rasional, dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, serta potensi partisipasi yang bias maupun bentuk-bentuk eksklusi yang terselubung dalam proses deliberatif tersebut
b. Kedua, Pembelajaran interaktif merupakan bentuk krusial kedua dalam praktik tata kelola yang berorientasi pada interaksi antarpelaku. Umumnya, proses tata kelola dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks dan sulit untuk diselaraskan, sehingga kemampuan untuk belajar menjadi komponen esensial dalam dinamika tersebut. Terdapat sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas pembelajaran dalam konteks pengelolaan interaksi ini, termasuk melalui mekanisme pembelajaran sosial serta pembelajaran antarorganisasi atau dalam kerangka kerja jaringan.
c. Ketiga, Pengambilan keputusan secara interaktif merupakan bentuk pemerintahan yang paling intensif dalam hal keterlibatan dan proses.

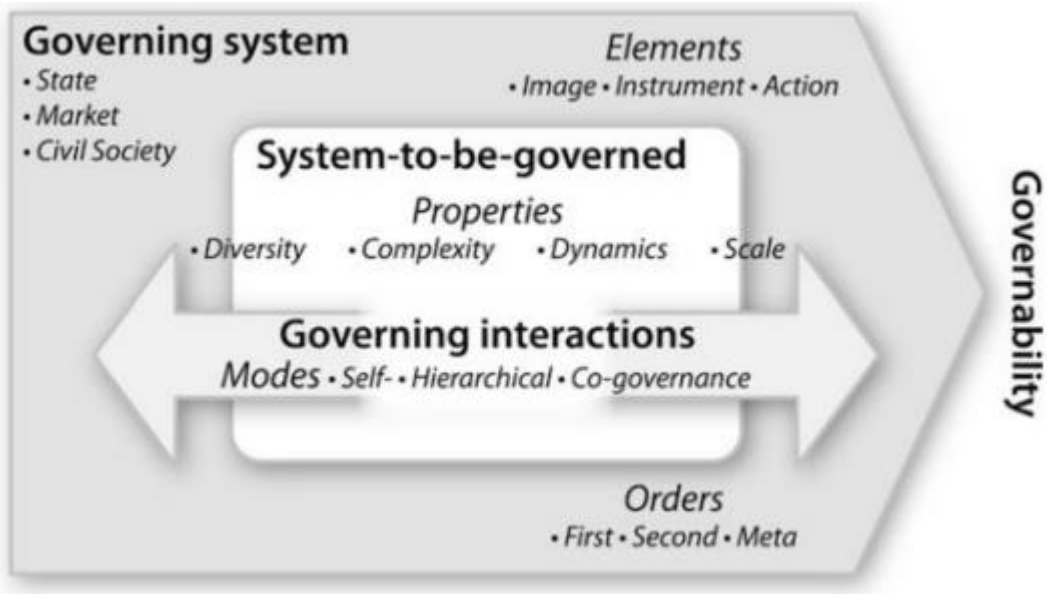
Sebagian pandangan melihat proses pengambilan keputusan sebagai sesuatu yang bersifat rasional, sistematis dan menyeluruh. Sementara itu, pandangan lain menilai bahwa pengambilan keputusan berlangsung secara bertahap, melalui langkah-langkah kecil, dan cenderung kurang terstruktur.

Interaksi governance, dalam bentuk apa pun, dapat dilihat sebagai campuran kerja sama dan konflik. Bagaimanapun juga, pemerintahan masyarakat biasanya berurusan dengan isu-isu sosial-politik yang sangat kontroversial. Interaksi pemerintahan yang berlangsung lama akan menunjukkan periode yang lebih kooperatif bergantian dengan periode yang lebih konfliktif. Beberapa interaksi dapat menunjukkan kedua fenomena tersebut pada saat yang sama: di bidangbidang tertentu akan ada kerja sama, sementara di bidang-bidang lain kepentingan dapat berbenturan dan interaksi mungkin bersifat kompetitif. Interaksi tata kelola dapat disusun dalam skala dari (sangat) konfliktif hingga (sangat) kooperatif dengan segala macam corak diantaranya.

B. Indikator *Governability*

Dari pemaparan teori diatas *Governability* dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Gambar 2. 1 Ringkasan Teori *Governability*



Sumber: Jurnal Theorizing Governability – The Interactive Governance Perspective – Jan Kooiman

Gambar diatas menggambarkan konsep *Governability* menurut Jan Kooiman. Diagram tersebut menunjukkan hubungan antara tiga komponen utama tata kelola: Governing System, System-to-be-Governed, dan Governing Interactions, serta bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi tingkat *Governability* suatu sistem. Hasil dari gambar diatas bisa kita simpulkan sebagai berikut ini:

1. ***Governing System* (Sistem Pengelolaan)**

   Sistem pengelolaan mencakup aktor, institusi, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola sebuah sistem sosial-politik. Governing system ini meliputi hal hal berikut ini:

   a. **Aktor:**

      1) Negara (*state*): Berperan sebagai pengatur utama dalam tata kelola.

2) Pasar (*market*): Melibatkan aktor ekonomi seperti perusahaan dan sektor swasta.
3) Masyarakat sipil (*civil society*): Termasuk individu, komunitas, dan organisasi non-pemerintah.

Dalam konteks Governing System, (Kooiman J, 2003) menegaskan bahwa aktor dalam tata kelola tidak hanya terbatas pada entitas negara, tetapi juga mencakup pasar dan masyarakat sipil. Dalam sistem sosial-politik modern, masyarakat sipil mencakup mahasiswa, organisasi sosial, LSM, serta komunitas penerima kebijakan. Keberadaan aktor-aktor ini memainkan peran penting dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif dan responsif, terutama ketika mereka dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan dan evaluasi program. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa sebagai penerima manfaat dalam tata kelola program beasiswa seperti KJMU menjadi bagian dari sistem yang mengatur (GS) dalam pengertian yang lebih luas.

b. Elemen *Governing System*:

1) *Image* (Citra): merujuk pada gambaran kolektif tentang bagaimana sistem tata kelola seharusnya bekerja. Citra ini dibentuk melalui nilai-nilai, pengetahuan, dan pengalaman yang dikomunikasikan dalam masyarakat, sehingga menjadi landasan normatif yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam tata kelola. Image juga berperan penting dalam proses pembentukan kebijakan dan menentukan bagaimana aktor dalam sistem tata kelola berinteraksi.
2) *Instrument* (Instrumen): merupakan alat dan mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan, seperti regulasi, kebijakan, teknologi, serta berbagai intervensi dari pemerintah maupun sektor swasta. Pemilihan instrumen dalam tata kelola sering kali bergantung pada ketersediaan sumber daya dan efektivitasnya dalam menangani tantangan yang ada. Instrumen juga berfungsi

sebagai jembatan antara pembentukan citra dan implementasi tindakan dalam tata kelola.

3) *Action* (Tindakan): mengacu pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh aktor tata kelola dalam menerapkan kebijakan dan regulasi. Tindakan ini dapat berupa koordinasi antar berbagai pihak, pelaksanaan kebijakan, serta intervensi langsung dalam sistem yang dikelola. Keberhasilan suatu tindakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas instrumen yang digunakan serta sejauh mana tindakan tersebut mencerminkan nilai dan tujuan yang telah dibentuk dalam citra tata kelola.

c. *Orders of Governance* (Tingkatan Tata Kelola)

Definisi: Tingkatan tata kelola mencerminkan dimensi operasional, institusional, dan normatif dari pengelolaan. Tiga Tingkatan Tata Kelola menurut (Kooiman J, 2003):

1) *First Order Governance*

Mengacu pada aktivitas operasional sehari-hari dalam pengelolaan, seperti penyelesaian masalah langsung dan penciptaan peluang. *First Order Governance* fokus pada tindakan nyata untuk menangani kebutuhan mendesak.

2) *Second Order Governance*

Terkait dengan pengelolaan institusi yang menjadi wadah tata kelola tingkat pertama. Termasuk desain, pembaruan, dan pemeliharaan struktur institusi. Misalnya, pembentukan kebijakan atau regulasi untuk mendukung tata kelola.

3) *Meta Governance* (Third Order Governance)

Mengacu pada norma, nilai, dan prinsip mendasar yang menjadi kerangka acuan tata kelola secara keseluruhan. Tingkat ini mencakup refleksi kritis tentang tujuan, arah, dan kualitas tata kelola.

2. *System-to-be-Governed* (Sistem yang Dikelola)

Sistem yang dikelola adalah entitas atau objek pengelolaan, yang mencakup ekosistem, komunitas, atau kelompok sosial lainnya. Karakteristik Utama *System-to-be-Governed*:

a. *Diversity* (Keberagaman)

Sistem yang dikelola terdiri dari berbagai elemen yang beragam, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Keberagaman ini memengaruhi bagaimana tata kelola dilakukan.

b. *Complexity* (Kompleksitas)

Elemen-elemen dalam sistem berinteraksi secara dinamis dan saling memengaruhi. Kompleksitas ini menciptakan tantangan dalam memahami dan mengelola sistem secara efektif.

c. *Dynamics* (Dinamika)

Sistem terus berubah karena tekanan internal (seperti konflik antar elemen) dan eksternal (seperti perubahan lingkungan atau ekonomi global)

d. *Scale* (Skala)

Sistem dapat bersifat lokal, nasional, atau global, dengan skala yang memengaruhi pendekatan tata kelola.

3. *Governing Interactions* (Interaksi Pengelolaan)

Interaksi antara aktor dalam sistem pengelolaan dan sistem yang dikelola yang membentuk inti dari tata kelola. Mode Utama Interaksi:

a. *Self-Governance*

Sistem dikelola secara mandiri oleh aktor lokal atau internal tanpa campur tangan signifikan dari otoritas eksternal. Misalnya, komunitas lokal yang mengatur sendiri sumber daya bersama (*commons*)

b. *Co-Governance*

Kolaborasi antara aktor negara, pasar, dan masyarakat sipil untuk mengelola sistem secara bersama-sama. Mode ini menjadi semakin penting dalam tata kelola modern karena kompleksitas masyarakat.

c. *Hierarchical Governance*

Pendekatan top-down, di mana otoritas formal (seperti negara) mengarahkan pengelolaan melalui aturan, regulasi, dan kebijakan.

BAB III
GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA, DINAS PENDIDIKAN, P4OP DAN KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL

A. PROVINSI DKI JAKARTA

1. Sejarah DKI Jakarta

DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memilki sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Pada masa kolonial Belanda, Jakarta dikenal dengan sebutan Batavia dan memiliki fungsi sebagai pusat administrasi Hindia Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, nama Batavia tersebut diubah menjadi Jakarta. Sejak saat itu, Jakarta terus mengalami perkembangan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

2. Letak Geografis

Gambar 3. 1 Peta Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Jakarta.bps.go.id

Secara geografis, DKI Jakarta terletak di pesisir barat laut Pulau Jawa denga luas wilayah sebesar 660,982 km². DKI Jakarta memiliki 113 pulau yang berada di kabupaten Kepulauan Seribu dan wilayah Kota Jakarta Utara. Jakarta terbagi menjadi 6 wilayah administrasi yang terdiri atas Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Dengan wilayah terluas dimiliki oleh Kota Jakarta Timur sebesar 28,7% dan terkecil dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 1,62%. Di sebelah utara, DKI Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur dan Selatan DKI Jakarta berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat dan pada sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten.

3. Kondisi TopografI

Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang berada di dataran rendah dengan ketinggian nya berkisar 7 meter diatas permukaan laut. DKI Jakarta memiliki suhu rata rata berkisar antara 21,20°C hingga 37,20°C. kelembaban udara DKI Jakarta cukup bervariasi dari 31,00% hingga 100,00%.

4. Kondisi Demografis

DKI Jakarta merupakan kota dengan kepadatan penduduk yang amat sangat tinggi. Berdasarkan data dari BPS tahun 2024

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	5.371.393
2	Perempuan	5.313.553
Total		**10.684.946**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin DKI Jakarta 2024

	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kep. Seribu	14.307	14.216	28.523
Jakarta Utara	913.199	895.786	1.808.985
Jakarta Timur	1.545.822	1.533.796	3.079.618
Jakarta Selatan	1.122.780	1.112.826	2.235.606
Jakarta Barat	1.243.251	1.226.803	2.470.054
Jakarta Pusat	532.287	517.027	1.049.314

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya perbedaan jumlah penduduk laki-laki dengan Perempuan tidak mengalami kesenjangan yang begitu jauh. Jumlah penduduk laki laki adalah 5.371.646 dan jumlah Perempuan adalah 5.300.454. dari tabel yang lain dapat dilihat bahwasanya masyarakat DKI Jakarta terbanyak berada di Jakarta Timur dengan 3.079.618 jiwa. Dan paling sedikit berada di Kepulauan Seribu dengan jumlah 28.523.

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah pemduduk (jiwa)
1	0-14	2.322.902
2	15-65	7.641.872
3	65>	726.800
Jumlah		**10.691.574**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tabel diatas mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, maka dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya kelompok umur 15 hingga 65 tahun yang dimana

merupakan umur produktif. Dari hal tersebut terlihat bahwa mayoritas masyarakat DKI Jakarta berada pada kondisi usia produktif yang berpotensi untuk dapat berkontribusi pada kegiatan pendidikan, sosial dan ekonomi. Adapun kelompok umur dengan jumlah terendah pada kelompok diatas 65 tahun.

5. Tingkat Pendidikan

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasrkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Sekolah Dasar	765.090
2	Sekolah Menengah Pertama	354.754
3	Sekolah Menengah Atas	190.143
4	Sekolah Menengah Kejuruan	196.259
5	Sarjana	701.366
JUMLAH		**2.208.431**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki kesadaran untuk berpendidikan cukup tinggi, yang dimana masyarakat yang berada pada status mahasiswa berada pada angka 701.366 jiwa

Tabel 3. 5 Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	2.239
2	Sekolah Menengah Pertama	1.068
3	Sekolah Menengah Atas	504
4	Sekolah Menengah Kejuruan	556
5	Universitas (Negeri-Swasta)	4-272

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari tabel diatas, sarana jenjang pendidikan yang berada di DKI Jakarta sudah lengkap di semua jenjang dari Sekolah Dasar Hingga Perguruan Tinggi . jumlah sarana pendidikan terbanyak dimiliki oleh Sekolah Dasar dan Perguruan Tinggi

6. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat DKI Jakarta pada tahun 2024 tergambar melalui fasilitas kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, akses terhadap pelayanan dasar, serta kondisi kesejahteraan dan kemiskinan. Pada sektor kesehatan, DKI Jakarta memiliki 195 unit rumah sakit umum dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 26.559 unit. Ketersediaan tenaga medis juga cukup memadai, dengan 11.222 orang dokter umum, 7.215 orang dokter spesialis, dan 3.978 orang dokter gigi (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024)

7. Kondisi Ekonomi

Tabel 3. 6 Sumber Pendapatan

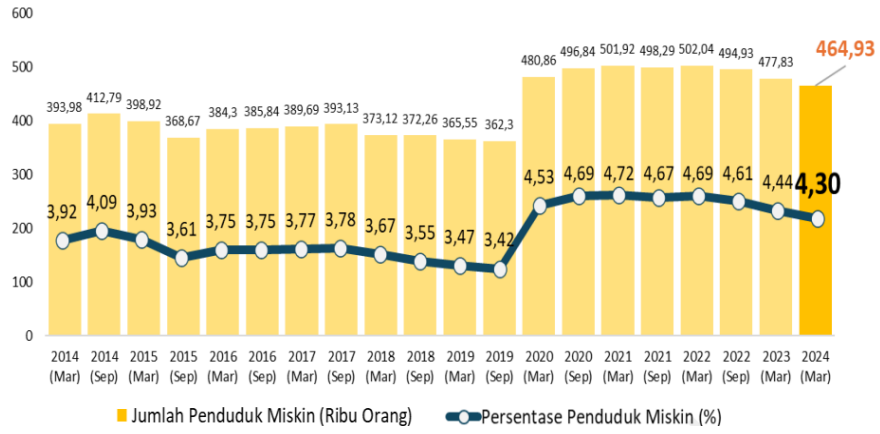
Sumber pendapatan	Jumlah (Milyar RP
Pendapatan Asli Daerah	49.139.94
Pendapatan Transfer	20.159.11
Pendapatan Lain-lain	1.747.98

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Berdasarkan tabel diatas, DKI Jakarta mendapatkan pendapat daerah dari tiga sumber utama, yaitu pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah menjadi kontributor terbesar, terutama dari pajak daerah seperti pajak kendaraan, restoran dan hotel. Pada tahun 2023, pendapatan Asli Daerah menyumbang sebesar Rp 49.139.94.00 yang

dimana digunakan untuk Pembangunan infrastruktur, pelayanan public dan program sosial bagi warga.

Gambar 3. 2 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Berdasarkan tabel diatas, kondisi kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukan adanya perbaikan secara bertahap jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah berlalu. Tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada periode Maret 2024 tercatatse sebesar 4,30%, angka ini mengalami penurunan dari periode Maret 2023 sebesar 4,44%. Namun, jika dibandingkan pada periode Maret 2021 yang dimana mengalami kenaikan tertinggi yang mencapai angka 4,72%. Tetapi angka kemiskinan pada periode Maret 2024 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum *Covid-19* yaitu pada periode maret 2019 sebesar 3,47%. Tren positif penurunan angka kemiskinan selama 3 tahun terakhir ini menjadi sebuah momen keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara konsisten dengan terus melakukan program untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel 3. 7 Jumlah Moda Transportasi

Moda Transportasi	Jumlah (Juta)
TransJakarta	372,7
KRL Commuter Line	328,1
Kereta Api Jarak Jauh	10,7

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa transportasi umum di DKI Jakarta memainkan peran yang sangat vital dalam mobilitas penduduk, dengan TransJakarta dan KRL sebagai moda transprotasi yang paling banyak digunakan

B. Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Gambar 3. 3 Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta



Sumber: Website Perum Perindo

Dinas Pendidikan merupakan instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur (PerGub) nomor 252 tahun 204 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Dinas

Pendidikan DKI Jakarta memiliki tugas utama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada bidang pendidikan, yang dimulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan menengah.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan juga Menyusun strategis dan anggaran serta menetapkan pedoman dan standar teknis pendidikan, melaksanakan program pendidikan formal dan non-formal, membina tenaga pendidik, serta melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta. Selain itu,, Dinas Pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bagi masyarakat yang kurang mampu, mengelola sarana dan prasarana serta menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait.

C. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3. 4 Logo P4OP



Sumber: Akun X @upt_p4op

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan adalah sebuah unit pelaksana teknis yang bekerjaa dibawah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan personal dan operasional pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Lembaga ini juga berperan penting dalam memastikan distribusi bantuan pendidikan yang transparan dan tepat sasaran bagi siswa dan Mahasiswa di Jakarta.

Lembaga ini memiliki tugas antara lain sebagai pengelolaan program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Fungsi lain dari lembaga ini adalah pendataan serta verifikasi penerima bantuan, pendistribusian dana pendidikan dan pengawasan serta evaluasi program yang dijalankan.

D. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul

Gambar 3. 5 Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) adalah program bantuan pendidikan yang diperkenalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2016 sebagai lanjutan dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Program ini didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 133 Tahun 2016, Pasal 7 Ayat 1 yang dirancang untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bertujuan untuk meningkatkan SDM dengan memberikan akses serta kesempatan pendidikan tinggi bagi wagra Jakarta yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik. Dengan dibentuknya program ini, diharapkan para penerima dapat menyelesaikan studi pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan kebutuhan penunjang akademik lainnya seperti tempat tinggal, transportasi dan lainnya.

Dana yang digelontorkan untuk program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang

dialokasikan tiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah penerima dan kebutuhan program. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sejak tahun 2016 hingga 2023 sebesar Rp11.433.392.849.003, pada tahun pertama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp 5.346.000.000 hingga pada tahun 2023 dana sebesar Rp 3.329.008.425.893 dialokasikan untuk program ini.

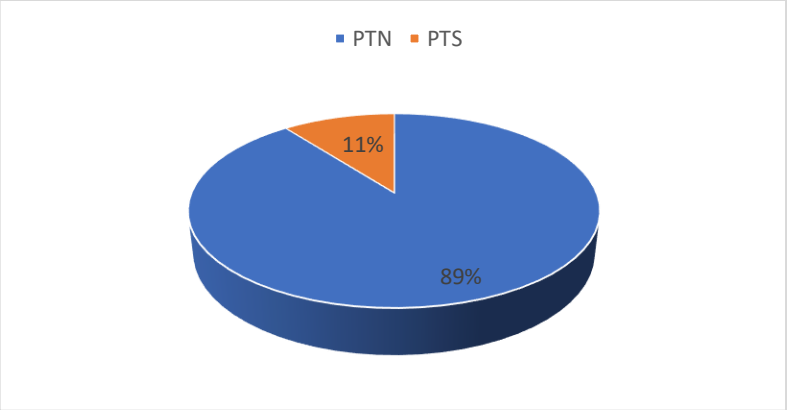
Tabel 3. 8 Jumlah penerima KJMU

Tahun	Penerima	
	Tahap 1	Tahap 2
2024	15. 648	15.649
2023	15.153	13.575
2022	14.193	16.708
2021	10.445	10.912
2020	-	10.264

Sumber: Instagram @upt.P4OP

Penerima manfaat program ini sejak diluncurkannya pada tahun 2016 hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Di tahun 2016 penerima manfaat ini sebanyak 594 mahasiswa dan terus meningkat secara signifikan hingga pada tahun 2023 penerima manfaat program ini sebanyak 15.153 mahasiswa yang tersebar di berbagai universitas di Indonesia.

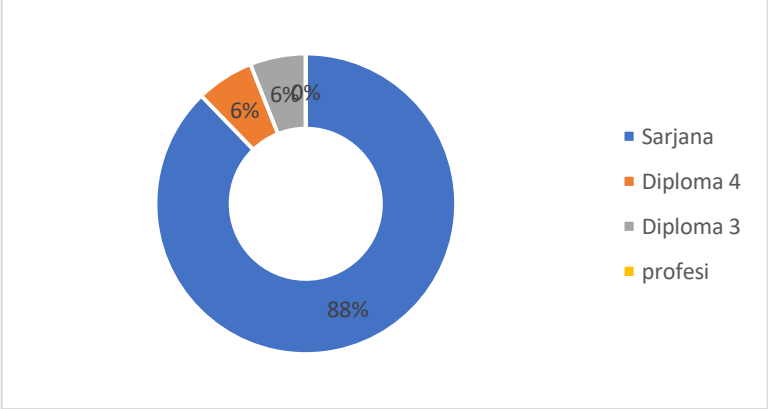
Bagan 3. 1 Jumlah Jangkauan Persebaran Penerima KJMU



Sumber: Instagram @upt.p4op

Dalam implementasinya, program KJMU telah menjangkau mahasiswa yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, mahasiswa penerima KJMU tercatat tersebar di 106 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 12 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Hal ini menunjukkan bahwa cakupan program ini sangat luas dan mencakup berbagai institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, guna memastikan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi berkualitas.

Bagan 3. 2 Persebaran Penerima Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Instagram @upt.p4op

Jika melihat distribusi penerima berdasarkan jenjang pendidikan, terdapat sebanyak 909 mahasiswa penerima KJMU yang sedang menempuh pendidikan di jenjang Diploma 3 (D3) Selanjutnya, terdapat 942 mahasiswa yang berada pada jenjang Diploma 4 (D4), serta mayoritas penerima, yakni sebanyak 13.293 mahasiswa, berada pada jenjang Strata 1 (S1) Selain itu, terdapat pula 9 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di jenjang profesi, yang menunjukkan bahwa program ini juga memberikan dukungan bagi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat profesional.

Mekanisme pendaftaran calon penerima KJMU biasanya dibuka dua kali dalam setahun melalui sistem yang dikelola oleh Pusat Pendanaan

Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dibawah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Calon penerima harus mengisi formulir, menyertakan KTP DKI Jakarta, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan bukti Penerimaan di Perguruan Tinggi negeri ataupun Swasta yang telah bekerja sama dengan program ini. Selanjutnya, data yang telah didaftarkan akan diverifikasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada yang benar-benar berhak. Setelah proses seleksi selesai, daftar penerima akan diumumkan dan pencairan dana akan dilakukan bertahap selama masa studi.

BAB IV

TATA KELOLA KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL

A. Dominasi Aktor Negara dan Pendekatan Teknokratis dalam Program KJMU

Temuan penelitian menunjukan bahwa *governing system* masih dijalankan secara dominan oleh aktor negara, khususnya Dinas Pendidikan dan P4OP, dengan pelibatan aktor pasar dan masyarakat sipil yang bersifat administratif dan belum partisipatif. Cara pandang pemerintah memposisikan KJMU sebagai instrumen intervensi sosial bagi keluarga miskin tercermin dalam kebijakan yang berorientasi pada bantuan, bukan beasiswa prestasi. Regulasi dan instrumen teknis telah disediakan dan terus diperbarui, termasuk sistem digital dan kerja sama lintas instansi, namun implementasinya masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya adaptif. Sementara itu, refleksi atas kebijakan belum dilakukan secara mendalam, yang menandakan bahwa tata kelola masih berada pada tataran operasional (first-order) dan belum mencapai refleksi strategis (meta-order governance).

1. Distribusi Peran Aktor dalam Governing System Program KJMU

Governing System mencakup kumpulan aktor yang berasal dari tiga domain utama, yaitu negara (*state)*, pasar (market), dan masyarakat sipil (civil society). Ketiga domain ini saling berinteraksi dan berperan dalam upaya mengelola permasalahan secara kolektif, ketiga aktor tersebut dapat diidentifikasi dari struktur dan pelaksanaan program sebagaimana tercermin dalam regulasi dan praktik di lapangan.

Aktor negara (*state*) dalam tata kelola KJMU meliputi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan dan unit pelaksananya, yaitu Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP). Berdasarkan Pergub No. 101 Tahun 2021, P4OP bertugas secara teknis dalam proses verifikasi data, pencairan bantuan, pengelolaan sistem, serta koordinasi administratif dengan pihak

kampus. Sementara Dinas Pendidikan berperan dalam pengambilan keputusan strategis, perumusan regulasi, serta pengawasan umum terhadap jalannya program.

> "Kami di P4OP menjalankan tugas administratif, termasuk pemrosesan data dan pencairan. Kebijakan tetap dari Dinas Pendidikan, dan itu bukan ranah kami untuk menentukan siapa yang dicabut bantuannya."
> **(Wawancara P4OP, 19 Februari 2025)**

Hasil wawancara dengan pihak P4OP memperlihatkan bahwa sebagian besar kebijakan program, termasuk proses evaluasi dan pencabutan bantuan, sepenuhnya berada di bawah otoritas Dinas Pendidikan, dan tidak melibatkan pihak luar secara langsung.

Sementara itu, aktor pasar (*market*) dalam konteks KJMU tercermin dalam keberadaan institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menjadi mitra teknis pemerintah dalam pelaksanaan program. Peran perguruan tinggi terutama terbatas pada validasi status mahasiswa aktif.

> "Kalau dari kampus sih nggak terlalu ikut campur. Mereka cuma bantu validasi waktu awal daftar aja. Selebihnya semua urusan ke Dinas atau P4OP"
> **(Wawancara P4OP, 5 Maret 2025)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan keterlibatan aktif dari pihak kampus dalam proses perancangan, evaluasi, atau advokasi kebijakan program. Hal ini menunjukkan bahwa peran kampus sebagai aktor non-negara belum dimaksimalkan sebagai mitra dialogis dalam sistem tata kelola (Kooiman J, 2003).

Aktor masyarakat sipil (*civil society*) diwakili oleh para mahasiswa penerima KJMU yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. Mereka merupakan pihak yang diatur (*governed*), namun secara teori memiliki potensi sebagai aktor aktif dalam mewujudkan tata kelola yang partisipatif. Sayangnya, mahasiswa tidak memiliki ruang formal resmi untuk terlibat dalam evaluasi program.

Distribusi peran dari ketiga kategori aktor tersebut menunjukkan bahwa *governing system* KJMU masih sangat didominasi oleh aktor

negara, terutama Dinas Pendidikan. Aktor pasar dan masyarakat sipil cenderung menjadi pelengkap administratif yang belum diberi ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif teori *governability*, hal ini mencerminkan pendekatan *hierarchical governance* yang belum mendorong terwujudnya tata kelola yang partisipatif dan kolaboratif antaraktor.

2. Pemerintah Provinsi Menempatkan KJMU sebagai Instrument Pembangunan Sosial Berbasis Bantuan Pendidikan

a. Cara pandang Pemerintah terhadap KJMU sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemahaman utama yang ditemukan dari informan P4OP menunjukkan bahwa sejak awal, program KJMU diposisikan sebagai bagian dari bantuan sosial, bukan beasiswa akademik dalam arti tradisional. Istilah "bantuan sosial" digunakan secara sadar untuk menekankan bahwa program ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada kelompok miskin, bukan sekadar penghargaan atas prestasi akademik.

> "Kenapa KJMU disebut bantuan sosial bukan beasiswa? Karena KJMU ini fokusnya untuk mengentaskan kemiskinan. kalau beasiswa itu diberikan terus-terusan, sedangkan kita objektifnya membantu keluarga miskin agar bisa kuliah."
> **(Wawancara P4OP, 17 Januari 2025)**

Berdasarkan pandangan tersebut memperlihatkan adanya *image* pemerintahan yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin negara, terutama untuk warga miskin. Tujuannya tidak hanya mengentaskan kemiskinan saat ini, tetapi juga memutus rantai kemiskinan di masa depan.

> "Tujuan utamanya adalah memperbaiki SDM dengan memberikan akses bantuan untuk pendidikan tinggi."
> **(Wawancara P4OP, 19 Februari 2025)**

Hal ini diperkuat dengan Pasal 3 Peraturan Gubenur NO. 97 Tahun 2019, ditegaskan bahwa program KJMU bertujuan:

a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi calon/mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan memiliki potensi akademik baik;
b. meningkatkan mutu pendidikan masyarakat; dan
c. menciptakan daya saing sumber daya manusia yang berkualitas.

Dari data yang diperoleh gambaran penyelenggara menunjukkan bahwa program KJMU adalah bentuk intervensi sosial berbasis nilai keadilan, yang membingkai pendidikan tinggi sebagai hak warga, bukan hak istimewa akademik. Dan juga, KJMU merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan tinggi sebagai sarana mobilitas sosial dan upaya jangka panjang dalam menanggulangi kemiskinan.

Governing image dari penyelenggara mencerminkan pendekatan nilai, di mana pendidikan diposisikan sebagai sebuah instrumen intervensi sosial. Ini sejalan dengan orientasi keadilan distributif, di mana kebijakan tidak semata mengejar efisiensi, tetapi juga menjamin kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

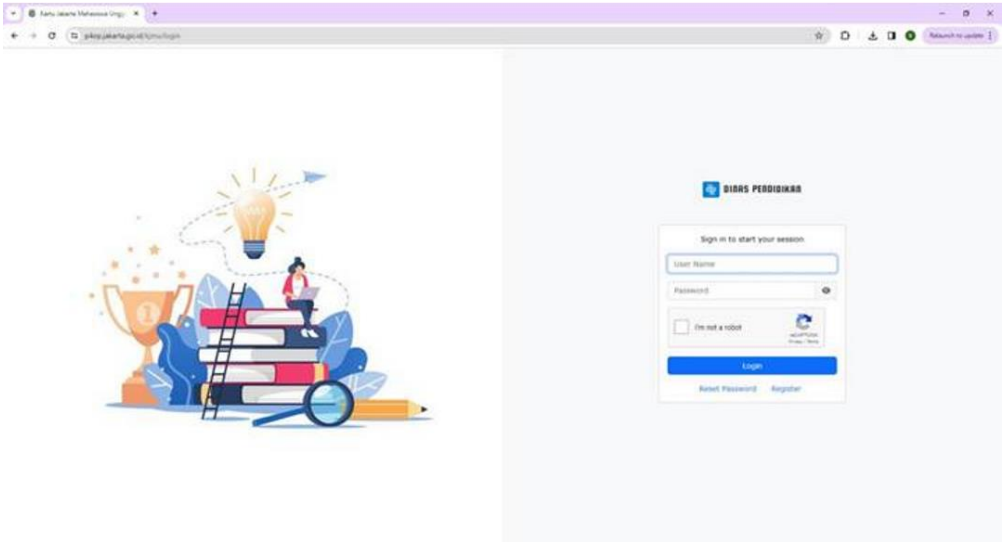
b. Kebijakan dan Alat yang Digunakan dalam Mewujudkan Tujuan Sosial Program

Cara pandang terhadap pentingnya akses pendidikan tinggi bagi masyarakat tidak mampu diinstitusionalisasikan melalui regulasi dan sistem kerja yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. Regulasi ini menjadi tonggak awal pembentukan KJMU, yang secara resmi diluncurkan pada tahun 2016. Dalam perkembangannya, kebijakan ini terus diperkuat dan disempurnakan melalui regulasi-regulasi lanjutan, antara lain Pergub Nomor 97 Tahun 2019, Pergub Nomor 91 Tahun 2020, dan Pergub Nomor 101 Tahun 2021. Ketiga regulasi tersebut memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai alur pendaftaran, syarat kelayakan penerima, hingga mekanisme pemberian sanksi. Salah satu

pembaruan penting yang diperkenalkan adalah mekanisme pendaftaran secara mandiri melalui sistem daring. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi, peningkatan transparansi, dan pengurangan kesalahan administratif yang sebelumnya sering terjadi akibat proses manual atau keterlibatan pihak ketiga dalam pendaftaran serta mengurangi manipulasi data yang digunakan oleh calon penerima untuk meloloskan sistem verifikasi.

Pasal 5 menjelaskan jenis bantuan yang diberikan: "Bantuan diberikan dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pendukung personal seperti biaya buku, transportasi, makan, dan kebutuhan lainnya." . Lalu Pasal 6 menegaskan bahwa besaran bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dapat berubah sewaktu-waktu: "Besaran bantuan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan mahasiswa dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu."

Gambar 4. 1 Halaman Utama Website KJMU



Sumber: Website *KJMU*

Gambar 4.1 mengambarkan sebuah pembaruan inovasi teknis dari segi implementasi berupa sistem pendaftaran yang dilakukan secara

mandiri dan secara daring guna meningkatkan efisiensi dan mencegah *Human Error* pada saat pengisian data.

> "Sekarang sudah bisa dilakukan pendaftaran secara mandiri. mengurangi error karena dulu banyak menggunakan orang lain untuk mendaftar."
> **(Wawancara P4OP, 19 Februari 2025)**

Berdasarkan data wawancara tersebut terungkap adanya perbaikan signifikan dalam proses pendaftaran program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Salah satu perwakilan P4OP menyampaikan bahwa saat ini pendaftaran KJMU sudah dapat dilakukan secara mandiri oleh calon penerima bantuan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan dalam proses pendaftaran yang sebelumnya kerap terjadi akibat keterlibatan pihak ketiga atau orang lain yang membantu mendaftar. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan mudah diakses, peserta kini memiliki kontrol penuh atas data yang mereka masukkan, sehingga meminimalkan potensi error administratif yang bisa berdampak pada kelayakan penerimaan bantuan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola program KJMU.

> "Kami bekerja sama dengan Dinsos untuk pencatatan kesejahteraan sosial, juga dengan Bapenda terkait kepemilikan mobil dan aset di atas 1 miliar."
> **(Wawancara P4OP, 17 Januari 2025)**

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa seleksi penerima berbasis data verifikasi silang antara DTKS dari Dinas Sosial, data aset warga yang dihimpun Bapenda, data kependudukan oleh DUKCAPIL, data kemahasiswaan oleh PDDikti. Dari data yang telah diperoleh pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelola program berusaha membangun sistem berbasis data faktual, bukan subjektifitas administrasi kampus atau pengusul.

Selain itu, salah satu bentuk dari instrumen teknis yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan program KJMU adalah dengan membuka posko pengaduan di setiap kantor

kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Posko ini mulai beroperasi sejak 10 Maret 2025, posko ini berfungsi sebagai pelayanan pada garis depan untuk mahasiswa penerima maupun masyarakat yang mengalami kendala administrasi seperti verifikasi pendataan DTKS.

> "Kami hanya dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada masyarakat maupun mahasiswa, penyelesaian masalah tersebut kami serahkan ke P4OP maupun instansi terkait"
> **(Wawancara Posko Pengaduan, 29 April 2025)**

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat keterbatasan peran posko pengaduan dalam menangani permasalahan yang dialami oleh mahasiswa penerima maupun masyarakat. Posisi mereka lebih bersifat penghubung informasi dari lapangan ke instansi yang berwenang. Hal ini menunjukan lemahnya *Governing Capacity* pada institusi pendukung.

Dalam aspek governing instrument, terlihat bahwa tata kelola KJMU telah mengarah pada sistem regulatif yang adaptif, berbasis data, dan memperhatikan kondisi fiskal daerah. Penggunaan sistem daring, padanan data terkait, dan regulasi fleksibel menunjukkan pendekatan *Governability* yang berbasis adaptasi sistemik.

c. **Pelaksanaan Program yang Adaptif terhadap Dinamika Lapangan**

Pelaksanaan KJMU menunjukkan pola responsif terhadap dinamika sosial dan teknis di lapangan. Evaluasi dilakukan secara rutin setiap semester untuk menilai kebermanfaatan program dari aspek akademik dan sosial.

> "Evaluasi dilakukan setiap akhir penyaluran dana. dicek IPK, pengabdian masyarakat, dan prestasi."
> **(Wawancara P4OP, 17 Januari 2025)**

Berdasarkan wawancara diatas dan diperkuat dengan Pasal 29 Peraturan Gubenur No. 91 Tahun 2020 menjelaskan bahwa evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bersama perangkat daerah terkait dilakukan sebanyak 2 kali sesuai dengan waktu pengalokasian anggaran, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur: "Evaluasi dan

pelaporan dilaksanakan oleh Dinas bersama perangkat daerah terkait dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur."

Gambar 4. 2 Call Center Whatsapp KJMU



Sumber: Website KJMU

Gambar 4.2 menunjukkan jalur komunikasi publik melalui media sosial KJMU yaitu melalui *WhatApp* dan melalui telefon seluler. Kanal ini disediakan sebagai sarana komunikasi dua arah bagi penerima beasiswa dan masyarakat umum untuk menyampaikan pertanyaan, kendala teknis, maupun pengaduan administratif terkait pelaksanaan program KJMU.

Selain evaluasi, P4OP juga menjalankan mekanisme respons publik melalui berbagai kanal seperti media sosial, *WhatsApp*, dan sesekali melakukan kunjungan lapangan. Kanal ini memungkinkan pemerintah merespons langsung laporan mahasiswa atau masyarakat.

> "Kami mengidentifikasi masalah dari pengaduan, monitoring media sosial kunjungan langsung ke universitas bermitra, atau WhatsApp." (Wawancara P4OP, 19 Februari 2025)

Dari perspektif *governing system*, keberadaan call center mencerminkan upaya institusional untuk menyediakan sistem layanan yang memfasilitasi komunikasi dan respon terhadap permasalahan teknis. Namun, secara struktural, kanal ini masih berfungsi sebagai instrumen birokratis yang beroperasi dalam ruang tanggap cepat dan administratif, tanpa didukung sistem umpan balik kebijakan yang terstruktur.

Pelaksanaan KJMU berjalan cukup adaptif dan terbuka terhadap dinamika lapangan, namun belum sepenuhnya memanfaatkan data evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan strategis. Tindakan ini memperlihatkan elemen *governing action* yang adaptif. P4OP tidak hanya menjalankan regulasi secara kaku, tetapi juga membangun fleksibilitas dalam menghadapi kompleksitas lapangan. Namun, belum seluruh pelaporan dijadikan umpan balik struktural dalam reformasi kebijakan.

3. Evaluasi KJMU Masih Bersifat Administratif dan Belum Mencapai Refleksi Kebijakan yang Mendalam

Temuan dari lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui P4OP secara rutin melaksanakan evaluasi terhadap program KJMU setiap akhir semester. Evaluasi ini difokuskan pada aspek-aspek administratif seperti nilai IPK, kegiatan pengabdian masyarakat, dan pelaporan prestasi. Namun demikian, evaluasi tersebut belum banyak digunakan untuk mengubah orientasi kebijakan atau menyusun visi jangka panjang program. Proses refleksi masih berhenti pada penguatan implementasi teknis, belum pada pengkajian ulang nilai dan tujuan program secara substantif.

a. Aktivitas Operasional dalam Pengelolaan Program KJMU

Salah satu indikator utama dari *first-order governance* dalam program KJMU adalah pelaksanaan aktivitas teknis dan operasional secara rutin, termasuk proses pendaftaran, verifikasi, pemantauan, hingga pencairan bantuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UPT P4OP telah menyusun dan menerapkan sistem pendaftaran yang komprehensif dan berbasis teknologi. Sistem ini menjadi pintu awal dalam pelaksanaan tata kelola program KJMU yang mencerminkan efektivitas instrumen serta kapasitas teknis lembaga pelaksana.

Program KJMU dikelola secara teknis oleh P4OP bekerja sama dengan berbagai aktor. Proses pendaftaran didesain sebagai rangkaian

tahapan yang sistematis, yang tidak hanya mencerminkan koordinasi lintas instansi, tetapi juga menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam mekanisme seleksi. Hal ini memperlihatkan karakter tata kelola berbasis partisipasi langsung (*self-administration*) sekaligus keterhubungan sistemik lintas kelembagaan.

Gambar 4. 3 Timeline Pendaftaran KJMU Tahun 2025



Sumber: Website KJMU

Gambar 4.3 menjelaskan alur pendaftaran KJMU yang didesain secara sistematis dalam beberapa tahapan yang melibatkan aktor dari berbagai tingkatan kelembagaan. Pemetaan tahapan ini menjadi penting untuk melihat bagaimana sistem tata kelola program berjalan dalam praktiknya, serta bagaimana masing-masing aktor mengemban fungsi verifikasi sesuai dengan domain kewenangan dan tanggung jawabnya.

Gambar 4. 4 Tampilan Pengumuman di Website KJMU



Sumber: Website P4OP

Gambar 4. 5 Tampilan Pengumuman di *Instagram* KJMU



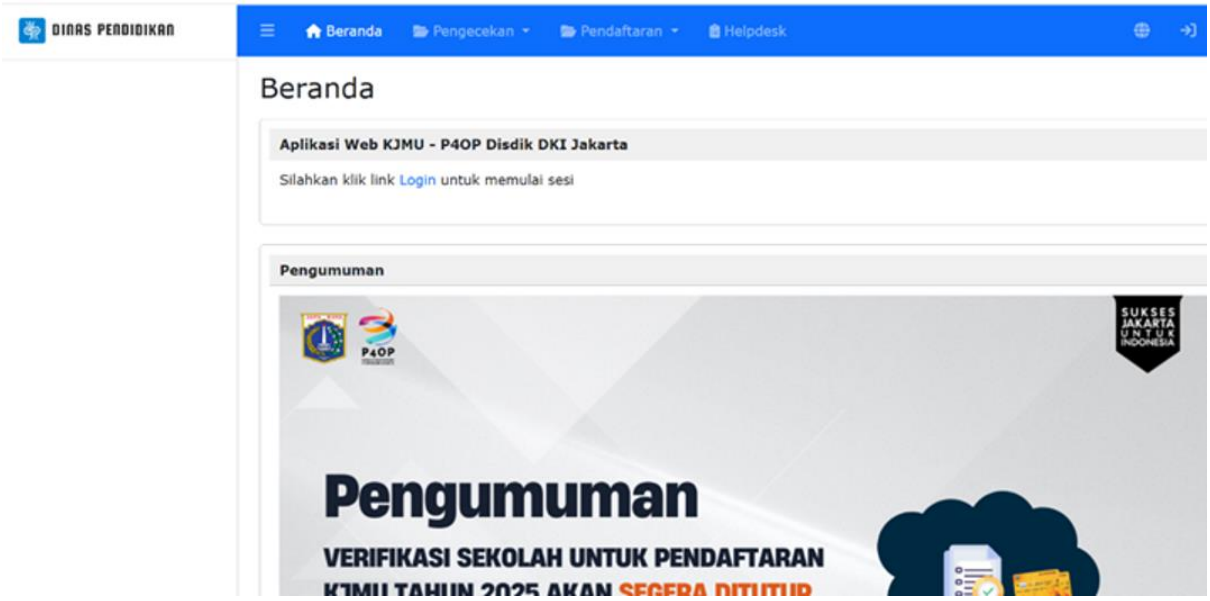
Sumber: *Instagram P4OP*

Tahap pertama dari pelaksanaan opersional adalah sosialisasi dan pengumuman pendaftaran. Kegiatan ini dilakukan secara digital melalui situs resmi P4OP, akun media sosial resmi seperti Instagram, dan jejaring sekolah dan kampus. Strategi digital ini memperlihatkan

efisiensi sekaligus perluasan jangkauan informasi, yang menjadi bagian dari *governing instrumentation* berbasis teknologi publik.

Tahap kedua adalah proses pendaftaran dan pengunggahan dokumen. Calon mahasiswa atau mahasiswa aktif dapat melakukan pengajuan melalui sistem daring secara mandiri yang sudah disediakan. Dalam tahap ini, mereka diwajibkan untuk melengkapi dokumen seperti KTP DKI Jakarta, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan dokumen akademik lainnya. Dari perspektif tata kelola, tahap ini menunjukkan pentingnya *self-administration* sebagai bentuk akuntabilitas horizontal, di mana mahasiswa menjadi aktor yang aktif dan bertanggung jawab dalam mendefinisikan kelayakannya sebagai penerima bantuan. Selain itu, digitalisasi proses pendaftaran memperlihatkan bentuk *governing instrumentation* berbasis teknologi yang digunakan untuk memperluas jangkauan dan efisiensi layanan publik.

Gambar 4. 6 Membuka situs resmi pendaftaran KJMU



Sumber: Website P4OP

Menampilkan antarmuka awal sistem digital pendaftaran KJMU. .Calon penerima KJMU memulai proses pendaftaran dengan mengakses laman resmi yang disediakan oleh P4OP. Situs ini

menyediakan menu login, pengumuman, dan panduan teknis pendaftaran. Langkah ini merupakan titik awal pengelolaan berbasis sistem daring sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa P4OP secara rutin melaksanakan evaluasi dua kali dalam setahun. Evaluasi ini berfokus pada aspek teknis dan administratif seperti pencapaian IPK, status aktif kuliah, dan laporan pengabdian masyarakat. Evaluasi dilakukan oleh internal P4OP dan dijadikan dasar pemberhentian atau kelanjutan bantuan.

> "Evaluasi dilakukan setiap akhir penyaluran dana, dicek IPK, pengabdian masyarakat, dan prestasi."
> **(Wawancara P4OP, 17 Januari 2025)**
> "Kami identifikasi masalah dari pengaduan, melalui media sosial, kunjungan langsung ke kantor, atau WhatsApp."
> **(Wawancara P4OP, 19 Februari 2025)**

Merujuk pada hasil wawancara, evaluasi ini penting untuk menjaga keteraturan administratif dan memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, pendekatannya lebih berorientasi pada pelaporan, bukan pada perbaikan sistem. Pelaksanaan evaluasi KJMU masih berada dalam kerangka teknis administratif, dan belum digunakan sebagai pijakan pembaruan kebijakan.

Pada Program KJMU, bentuk *first-order governance* terlihat dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran, verifikasi data sosial dan akademik, pencairan dana, hingga evaluasi rutin yang dilakukan dua kali dalam satu tahun ajaran.

First-order governance mencerminkan manajemen rutin dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini, P4OP cukup konsisten menjalankan fungsinya. Namun pendekatan ini masih bersifat *compliance-oriented* dan belum menjangkau aspek strategis.

b. Perubahan Sistem dan Perbaikan Prosedur Secara Parsial

Ada beberapa upaya reflektif terhadap prosedur teknis yang dilakukan oleh penyelenggara, misalnya perubahan sistem pendaftaran dari manual ke daring, serta perubahan persyarat. Namun, perubahan tersebut lahir lebih sebagai respons terhadap kesalahan teknis, bukan hasil evaluasi menyeluruh.

> "Dulu banyak mahasiswa pakai jasa orang lain daftar, makanya sekarang sistem dibuat mandiri."
> **(Wawancara P4OP, 19 Februari 2025)**

Merujuk pada hasil wawancara diketahui bahwa pada periode sebelumnya, terdapat praktik perwakilan atau penggunaan pihak ketiga dalam proses pendaftaran, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data maupun penyalahgunaan wewenang. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, sistem pendaftaran kemudian dirancang lebih mandiri, yang artinya setiap calon penerima wajib melakukan proses pendaftaran secara pribadi melalui akun masing-masing. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran program.

> "Pergub KJMU sudah mengalami perubahan sebanyak 2 kali, yaitu Pergub No. 97 Tahun 2019, Pergub No 91 Tahun 2020, Pergub No 101 Tahun 20201."
> **(Wawancara P4OP, 6 Mei 2025)**

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa perubahan Peraturan Gubernur yang terjadi sebanyak dua kali revisi substansial terhadap peraturan awal. Perubahan-perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan seiring dengan dinamika pelaksanaan program di lapangan. Revisi tersebut dapat mencakup aspek teknis, persyaratan administratif, hingga mekanisme penyaluran dana, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dari program KJMU.

Perubahan regulasi dari tahun 2019 hingga 2021 mencerminkan adanya refleksi sistem yang konsisten. Namun, proses pembaruan

masih berlangsung secara elitis, tanpa melibatkan aktor non-pemerintah secara berarti. Tata kelola program KJMU belum membuka ruang deliberatif dalam revisi kebijakan.

Refleksi sistem yang dilakukan melalui pembaruan regulasi menunjukkan kesadaran pemerintah untuk memperbaiki efektivitas teknis program KJMU. Namun, refleksi ini belum melibatkan publik sebagai mitra deliberatif. Mahasiswa, kampus, dan masyarakat tidak memiliki ruang untuk memberikan masukan terhadap revisi regulasi. Hal ini membuat kebijakan tetap elitis, meskipun secara teknis mengalami perbaikan.

Dengan kata lain, second-order governance memang terjadi, tapi belum dilaksanakan dalam semangat partisipasi. Tata kelola masih bersifat teknokratis, belum deliberatif.

c. Ketiadaan Refleksi Nilai dan Arah Strategis Program

Hingga saat ini, belum ditemukan inisiatif dari pemerintah untuk melakukan refleksi mendalam terhadap arah dan nilai-nilai dasar program KJMU. Tidak ada indikasi bahwa pengelola mempertimbangkan perubahan paradigma bantuan misalnya, apakah skema bantuan sosial masih relevan, atau bagaimana dampak jangka panjang program terhadap mobilitas sosial lulusan.

> "Apakah ada rencana refleksi besar atau pergeseran visi program KJMU di masa depan? Saat ini belum ada."
> **(Wawancara P4OP, 6 Mei 2025)**

Dari temuan lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia pula mekanisme banding atau konsultasi formal yang memungkinkan penerima manfaat memberikan masukan terhadap arah kebijakan. Ini menunjukkan bahwa refleksi nilai belum menjadi perhatian penyelenggara.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan tidak ditemukan bukti adanya refleksi nilai dan arah jangka panjang dalam tata kelola KJMU. Program berjalan tanpa perubahan visi substantif sejak diluncurkan.

Third-order governance berkaitan dengan refleksi kritis atas nilai dan arah kebijakan. Dalam konteks ini, KJMU belum menunjukkan adanya praktik meta-governance. Ketiadaan forum deliberatif atau evaluasi berbasis outcome menunjukkan bahwa program masih berjalan dalam kerangka teknokratik.

Tata kelola program KJMU masih didominasi oleh first-order governance, yaitu pelaksanaan teknis dan administratif seperti verifikasi dokumen dan pencairan dana. Pada tingkat second-order governance, evaluasi kelembagaan dan pembaruan kebijakan memang terjadi, namun masih terbatas, dengan minimnya pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dan mahasiswa. Sementara itu, pada tataran meta-governance, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki arah kebijakan jangka panjang yang tercermin dalam regulasi dan visi pembangunan sumber daya manusia. Namun, refleksi nilai-nilai seperti partisipasi, keadilan sosial, dan transparansi dalam implementasi KJMU masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa meta-governance belum berfungsi secara maksimal sebagai kerangka normatif dalam pengambilan keputusan strategis terkait program beasiswa ini.

Tata kelola program KJMU dari sisi *governing system* masih berfokus pada pelaksanaan teknis dan administratif yang cenderung prosedural, seperti verifikasi data, pendataan ulang, dan pencairan dana, dengan sedikit ruang untuk refleksi kebijakan yang bersifat strategis dan inklusif. Dominasi pendekatan *top down* dari P4OP dan pemerintah daerah belum disertai dengan pola evaluasi yang melibatkan aktor-aktor non-pemerintah atau penerima manfaat secara aktif. Dalam kerangka governability, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengatur belum mampu mengembangkan kapasitas kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif. Dengan minimnya upaya untuk merevisi pendekatan berdasarkan evaluasi partisipatif, *governing system* KJMU masih berada pada tahap manajerial dan belum berkembang sebagai sistem

pembelajaran kebijakan yang responsif terhadap keragaman kondisi di lapangan

B. Keberagaman dan Dinamika Sosial Mahasiswa Penerima KJMU Menjadi Tantangan dalam Penyaluran Program

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem yang menjadi sasaran tata kelola program KJMU, yakni mahasiswa dari kelompok miskin di DKI Jakarta, memiliki karakteristik yang beragam dan dinamis. Penerima bantuan tidak hanya tersebar di seluruh universitas yang berada di wilayah administratif Jakarta, tetapi juga berasal dari berbagai jenis perguruan tinggi (negeri/swasta, pusat/daerah, bahkan kementerian berbeda). Selain itu, kondisi sosial-ekonomi dan status akademik mahasiswa berubah dari waktu ke waktu, yang memengaruhi kelayakan mereka sebagai penerima bantuan. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga akurasi data, ketepatan sasaran, dan efektivitas program.

1. Tingginya Keberagaman Mahasiswa Penerima Menuntut Penyesuaian Layanan dan Kebijakan

Tabel 4. 1 Sebaran Domisi Penerima KJMU

No	Wilayah Domisili	Jumlah penerima
1	Jakarta Selatan	3.628
2	Jakarta Barat	3.028
3	Jakarta Utara	1.664
4	Jakarta Timur	3.370
5	Jakarta Pusat	1.617
6	Kepulauan Seribu	25
Total		**13.575**

Sumber: Website *Satudata*

Berdasarkan data diatas program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjangkau ribuan mahasiswa dari berbagai latar belakang wilayah dan jenis perguruan tinggi. Data penerima KJMU Tahap 2 Tahun

2023 mencatat bahwa total penerima mencapai **13.575 orang**, yang tersebar di seluruh wilayah administratif DKI Jakarta. Sebaran domisili ini menunjukkan bahwa kelompok penerima tidak terkonsentrasi pada satu kawasan tertentu, melainkan meluas dari pusat kota hingga wilayah pinggiran seperti Kepulauan Seribu

Tabel 4. 2 Sebaran Jenis Perguruan Tinggi

Jenis Perguruan Tinggi	Jumlah penerima
Perguruan Tinggi Negeri	7.073
Perguruan Tinggi Swasta	6.502
Total	**13.575**

Sumber: Website *Satudata*

Berdasarkan data diatas, keragaman juga terlihat dari jenis perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan. Dari total penerima, sebanyak 7.073 orang berkuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 6.502 orang di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya menyasar institusi milik negara, melainkan juga mendukung pendidikan di sektor swasta yang umumnya memiliki struktur biaya yang lebih tinggi. Situasi ini pun menimbulkan tantangan dalam penyesuaian administratif dan pencairan dana, karena masing-masing institusi dan universitas memiliki struktur dan birokrasi yang berbeda. Berikut merupakan sebaran universitas tujuan penerima KJMU

Tabel 4. 3 Universitas dengan Penerima KJMU Terbanyak

No.	Perguruan Tinggi	Jumlah Penerima
1	Universitas Negeri Jakarta	2.857
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1.960
3	UPN Veteran Jakarta	833
4	Universitas Gunadarma	693
5	Universitas Nasional	590

6	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	583
7	Politeknik Negeri Jakarta	484
8	Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta	417
9	Institut Pertanian Bogor	366
10	Universitas Mercu Buana	345
11	Universitas Brawijaya	320
12	Universitas Singaperbangsa Karawang	306
13	Universitas Indonesia	277
14	Universitas Sultan Agung Tirtayasa	273
15	Universitas Pendidikan Indonesia	246
16	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	215
17	Institut Teknologi Sumatera	164
18	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	146
19	Universitas Diponegoro	137
20	Universitas Negeri Semarang	130

Sumber: Website *Satudata*

Berdasarkan pada sebaran universitas pilihan penerima KJMU, dari 20 universitas dengan penerima KJMU terbanyak terdapat 10 universitas yang berada di DKI Jakarta dan sebagian lagi berada diluar wilayah DKI Jakarta. Hal ini mengakibatkan perbedaan kebutuhan hidup bagi mahasiswa yang universitasnya berada di wilayah DKI Jakarta dengan universitas diluar wilayah DKI Jakarta, seperti mahasiswa yang berkuliah diluar wilayah DKI Jakarta harus membayar biaya tempat tinggal. Mahasiswa penerima KJMU memiliki latar belakang yang sangat beragam dari sisi

domisili, jenis kampus, kementerian pengampu, hingga kebutuhan biaya. Tingginya keberagaman karakteristik ini menuntut kebijakan yang fleksibel dan adaptif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, meskipun secara administratif tertangani, namun dari sisi kebutuhan riil, hingga saat ini skema bantuan KJMU ini masih menggunakan pendekatan yang seragam yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik pada tiap kelompok penerima.

Tingginya keragaman mahasiswa penerima KJMU menuntut desain kebijakan yang fleksibel dan diferensial. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang diambil masih bersifat seragam. Hal ini berisiko menghasilkan ketimpangan tersembunyi yang di mana mahasiswa dengan beban lebih besar tetap menerima jumlah bantuan yang sama dengan mahasiswa dari beban yang lebih ringan.

2. Kompleksitas Sistem Sosial dan Kelembagaan Membutuhkan Tata Kelola yang Terintegrasi dan Adaptif

Pelaksanaan program KJMU tidak hanya menghadapi keberagaman penerima, tetapi juga tingkat kompleksitas tinggi yang mencakup sistem sosial, data administratif, serta hubungan kelembagaan lintas instansi. Kompleksitas ini tidak hanya berasal dari jumlah penerima yang besar dan tersebar, tetapi juga dari banyaknya institusi yang harus terlibat secara terkoordinasi untuk menjamin akurasi data, kelancaran pencairan, dan respons terhadap dinamika lapangan.

Proses seleksi dan verifikasi mahasiswa penerima bantuan memerlukan pemadanan data dari berbagai sumber. Selain DTKS, ada verifikasi tambahan dengan data Dukcapil, dan Bapenda. Setiap proses ini harus melalui jalur administratif lintas lembaga, termasuk musyawarah kelurahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk validasi sosial keadaan riil calon penerima.

> "Kalau KJP itu sekolah-sekolah di bawah kita langsung. Tapi KJMU itu kampus-kampus, ada yang di bawah Kemendikbud, Kemenag, bahkan swasta. Koordinasinya nggak sesederhana itu, makanya pencairan bisa berbeda."

(Wawancara P4OP, 19 Februari 2025)

Merujuk pada data wawancara diatas tantangan tidak berhenti pada level teknis verifikasi data. Menurut P4OP, tantangan utama justru terletak pada koordinasi dengan perguruan tinggi, yang tidak berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Berbeda dengan KJP yang berurusan dengan sekolah (di bawah Disdik DKI Jakarta), program KJMU ini juga melibatkan universitas yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan bahkan swasta. Hal ini menyebabkan jadwal pencairan bantuan seringkali tidak sinkron dan bergantung pada masing-masing kampus dikarenakan tiap-tiap kampus memiliki kebijakan dan koordinasi yang berbeda-beda (Sagita, 2021)

Selain itu, kompleksitas semakin bertambah karena keterbatasan jumlah pengelola di P4OP. Seluruh program KJMU yang melibatkan lebih dari 15.000 mahasiswa hanya dikelola oleh tiga orang staf inti, masing-masing memiliki tugas khusus.

> "Yang urus KJMU di P4OP hanya tiga orang inti. Ibu Dian sebagai ketua pelaksana, yang satu pegang data dan sistem (dibantu tim KJP), satu lagi urus pengaduan. Mengelola 15 ribuan mahasiswa nggak mudah."
>
> **(Wawancara P4OP, 19 Februari 2025)**

Sebagaimana diungkapkan oleh informan, kompleksitas dalam pelaksanaan KJMU tidak hanya muncul dari sisi verifikasi data, tetapi juga dari koordinasi kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia. Koordinasi dengan kampus lintas kementerian, keterbatasan SDM pelaksana, serta kebutuhan penanganan kasus khusus menjadikan program ini sangat menuntut secara kelembagaan. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan sistem tata kelola yang lebih terintegrasi, serta penguatan kelembagaan pelaksana program di tingkat teknis.

Situasi yang dihadapi dalam tata kelola KJMU memperlihatkan betapa tingginya tingkat kompleksitas yang harus dihadapi oleh pelaksana program. Kompleksitas ini tidak hanya muncul dari teknis pemadanan data yang melibatkan banyak instansi, tetapi juga dari hubungan kelembagaan yang lintas kewenangan. P4OP, sebagai

pelaksana program, harus menjembatani berbagai jenis perguruan tinggi baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, maupun swasta yang masing-masing memiliki aturan dan kultur birokrasi sendiri.

Tiga orang staf inti untuk mengelola lebih dari 15.000 mahasiswa aktif, dengan tugas yang terbagi ke dalam tiga bidang berbeda: kepemimpinan dan koordinasi, pengelolaan sistem data, serta penanganan pengaduan. Beban kerja yang sangat berat ini membuat pengelola harus bekerja secara multitugas dan rentan mengalami kelelahan administratif.

Hal ini menyebabkan pencairan dana sering kali tidak seragam, tergantung pada kecepatan masing-masing kampus dalam merespons surat atau prosedur yang dikirimkan oleh P4OP. Sementara itu, di sisi lain, mahasiswa sebagai penerima bantuan dan masyarakat umum sering kali memiliki ekspektasi bahwa proses pencairan akan berjalan seragam dan instan, seperti halnya program KJP untuk sekolah. Padahal, kondisi lapangan jauh lebih rumit.

Dalam konteks ini, kompleksitas tidak hanya hadir dalam bentuk teknis, tetapi juga dalam bentuk tekanan institusional. Ketika beban kerja dan kerumitan sistem tidak seimbang dengan kapasitas kelembagaan, maka kualitas layanan program pun terancam. Tata kelola yang baik dalam situasi ini memerlukan penguatan sistem digital, standardisasi kerja sama lintas instansi, dan yang tak kalah penting yaitu peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di lapangan.

3. Dinamika Sosial Mahasiswa Memengaruhi Stabilitas Status Kelayakan KJMU

Fakta lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa status sosial dan akademik mahasiswa dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, mahasiswa bisa saja pindah kampus, mengambil cuti akademik, bahkan *drop out* (DO) Semua perubahan ini berdampak langsung pada status kelayakan bantuan.

> “Pencabutan bantuan dilakukan apabila penerima terbukti melanggar aturan atau tidak memenuhi syarat.”
> **(Wawancara P4OP, 6 Mei 2025)**

Berdasarkan wawancara yang diperoleh menegaskan bahwa program KJMU memiliki sistem pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pelanggaran aturan, seperti pemalsuan dokumen, perubahan status sosial ekonomi, atau ketidaksesuaian data, menjadi dasar bagi pihak pengelola untuk menghentikan pemberian bantuan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan ketertiban dalam pelaksanaan program agar tetap tepat sasaran dan berkeadilan.

> “Update data DTKS sejauh ini dilakukan tiga kali, tetapi pembukaan pendaftarannya tergantung keputusan gubernur.”
> **(Wawancara Dinas Sosial, 29 April 2025)**

Namun, dinamika mahasiswa tersebut tidak selalu terdeteksi oleh sistem secara cepat. Terutama karena proses pemutakhiran data sosial ekonomi mahasiswa, yang masih bergantung pada keberlanjutan dan konsistensi pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial. Proses ini tidak dilakukan secara berkala dan cenderung mengikuti arahan pimpinan daerah

> “Mereka berpikir bahwa setelah daftar, maka akan langsung menerima bantuan, padahal datanya berubah.”
> **(Wawancara P4OP, 19 Februari 2025)**

Dari temuan lapangan menemukan polemik seperti muncul sejumlah kasus di mana mahasiswa tidak menyadari bahwa status sosial atau akademik mereka telah berubah, sementara sistem tidak memberikan peringatan dini. Banyak mahasiswa yang berasumsi bahwa setelah mendaftar, bantuan akan terus mengalir, tanpa memahami bahwa perubahan data bisa menggugurkan kelayakan mereka.

Namun, sistem manajemen program KJMU belum mampu mengimbangi dinamika tersebut secara adaptif. Pencabutan bantuan masih dilakukan secara manual dan bersifat reaktif, serta sangat bergantung pada pelaporan dan evaluasi berkala. Belum tersedia sistem

pemantauan berbasis waktu nyata atau notifikasi otomatis, sehingga banyak perubahan status mahasiswa tidak langsung terdeteksi oleh pelaksana program.

> "Terjadinya perubahan kepemimpinan, terjadi juga perubahan kebijakan. Jaman Pak Anies lebih longgar, siapapun bisa mengusulkan bantuan. Jaman Pak Heru lebih ketat agar lebih tepat sasaran."
> **(Wawancara P4OP, 17 Januari 2025)**

Lebih jauh lagi, program KJMU juga terpengaruh oleh dinamika arah kebijakan sebagai akibat dari perubahan kepemimpinan daerah. Saat kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, pendekatan kebijakan cenderung lebih longgar dan membuka ruang bagi banyak pihak untuk mengusulkan bantuan. Namun, pada masa Penjabat Gubernur Heru Budi, pendekatan menjadi lebih ketat dan selektif, dengan fokus pada ketepatan sasaran.

Dalam konteks ini, P4OP sebagai pelaksana teknis mengaku tetap memberikan masukan dan evaluasi dari lapangan, tetapi keputusan akhir selalu berada di tangan pimpinan

> "Dari P4OP tetap memberikan evaluasi, tetapi keputusan berada di pimpinan."
> **(Wawancara, 17 Januari P4OP)**
> "Karena sudah berkomitmen kerja di pemerintah, jadi harus menurut kepada pemerintah walau untuk mencapai kesepakatan tersebut akan adanya diskusi-diskusi. P4OP ikut andil diskusi dalam taraf tertentu, biasanya menyampaikan hal-hal teknis karena sebagai pelaksana."
> **(Wawancara, 17 Januari P4OP)**

Hasil wawancara menunjukan bahwa Dinamika program KJMU terjadi di dua sisi perubahan status sosial dan akademik mahasiswa, serta perubahan arah kebijakan akibat pergantian kepemimpinan. Sistem yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu merespons kedua jenis dinamika ini dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu, tata kelola program perlu dilengkapi dengan mekanisme adaptasi yang kuat, baik secara teknis maupun institusional.

Program KJMU dijalankan dalam sistem sosial dan politik yang terus bergerak. Dinamika di sisi mahasiswa seperti perubahan status

akademik dan kondisi sosial sangat memengaruhi validitas data dan ketepatan sasaran bantuan. Namun, sistem pengelolaan data yang tersedia belum cukup adaptif untuk menanggapi perubahan ini secara real-time. Akibatnya, pencabutan atau pemberian bantuan menjadi reaktif dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan.

Di sisi lain, tata kelola program juga tidak berada dalam ruang yang netral dari dinamika politik. Setiap pergantian kepemimpinan membawa pendekatan baru terhadap cara program ini dijalankan. Pelaksana teknis seperti P4OP berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya otonom. Mereka dapat memberikan evaluasi dan menyuarakan kondisi teknis lapangan, tetapi arah kebijakan tetap ditentukan oleh pimpinan politik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika dalam KJMU tidak hanya bersumber dari penerima manfaat, tetapi juga dari faktor struktural dan politik di tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, tata kelola program membutuhkan sistem yang tidak hanya adaptif terhadap mahasiswa, tetapi juga cukup lentur untuk menjaga kesinambungan meskipun terjadi perubahan arah kebijakan.

Keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mahasiswa penerima KJMU menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program, khususnya dalam hal pemerataan informasi, verifikasi administratif, dan keterlambatan pencairan dana. Dalam kerangka governability, kompleksitas pada sistem yang diatur (STBG) menuntut respons kebijakan yang adaptif, namun pendekatan yang digunakan masih bersifat seragam dan birokratis. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika sosial mahasiswa sebagai bagian penting dari desain dan pelaksanaan kebijakan, sehingga berisiko menghambat tujuan utama program dalam menciptakan keadilan akses pendidikan tinggi.

4. Skala dalam Tata Kelola Penerima Program KJMU

Skala sistem yang dikelola dalam program KJMU tidak hanya berada di tingkat lokal atau provinsi, tetapi telah berkembang hingga skala nasional. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, para penerima KJMU tersebar di lebih dari 120 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang mencakup wilayah Jabodetabek hingga luar Pulau Jawa.

Berdasarkan tabel 4.3 yaitu 20 universitas dengan jumlah penerima KJMU terbanyak tidak hanya berada di Jakarta, tetapi juga tersebar di kota-kota lain seperti Bandung, Lampung, Semarang, dan Malang. Ini menunjukkan bahwa jangkauan program KJMU telah mencapai berbagai wilayah Indonesia. Sebagai contoh, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung), Institut Teknologi Sumatera (ITERA), dan Universitas Brawijaya (UB) menjadi beberapa kampus dengan penerima terbanyak.

Persebaran penerima KJMU di berbagai universitas dan wilayah menunjukkan bahwa tata kelola program ini harus memperhitungkan skala geografis, administratif, dan sosial. Sistem yang terlalu sentralistik akan kesulitan merespons dinamika lokal, sehingga diperlukan desain kebijakan dan sistem informasi yang fleksibel *dan real-time.*

Dalam teori *Governability*, skala merupakan komponen penting yang menggambarkan sejauh mana suatu sistem dapat dikelola secara efektif jika tersebar di berbagai tingkat dan lokasi. Program KJMU merupakan contoh dari sistem sosial multiskala, di mana pengelola di level provinsi harus mengoordinasikan kebijakan terhadap penerima di seluruh Indonesia.

C. Relasi Program KJMU Masih Didominasi Pemerintah, Meski Ada Ruang Partisipatif Terbatas

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program KJMU, interaksi antara aktor-aktor yang terlibat masih menunjukkan dominasi pemerintah daerah. Meskipun terdapat ruang-ruang

partisipatif, seperti pelibatan koordinator kampus dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa, namun karakter utama dari interaksi tata kelola tetap berorientasi pada model *top-down*. Relasi ini menempatkan pemerintah sebagai pengambil keputusan utama, sementara kampus dan mahasiswa masih lebih banyak sebagai pelaksana pasif.

Interaksi antar pelaku dalam tata kelola program KJMU menunjukkan bahwa pola relasi yang terbentuk masih sangat didominasi oleh pemerintah daerah, khususnya melalui peran P4OP dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dominasi ini tampak dalam seluruh aspek kebijakan strategis dan pelaksanaan teknis, di mana keputusan-keputusan utama tetap berada di tangan pemerintah daerah. Meskipun terdapat indikasi ruang partisipatif dan beberapa inisiatif dari aktor non-pemerintah seperti mahasiswa dan pihak perguruan tinggi, namun bentuk interaksi ini belum sepenuhnya mencerminkan model tata kelola kolaboratif.

> "kalo dilibatkan langsung sih tidak ada instruksi, namun kalo misal ada masyarakat menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana, dia dapat mengadu dengan serta bukti bukti"
> **(Wawancara P4OP, 19 Februari 2025**)

Temuan ini menunjukkan bahwa kontrol masih bersifat tersentralisasi pada aktor negara. Simpulannya, keterlibatan aktor non-pemerintah belum menyentuh ruang-ruang pengambilan keputusan yang substansial. Secara analitis, hal ini menunjukkan bentuk interaksi yang masih didominasi *hierarchical governance* dalam kerangka *Governability*, di mana pemerintah berperan dominan dan membatasi ruang interaksi horizontal.

> "Mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri program pengabdian masyarakat seperti apa yang ingin dilaksanakan. Namun, harus dilakukan secara mandiri dan terpisah dari kegiatan kampus."
> **(Wawancara P4OP, 6 Mei 2025)**

Salah satu indikasi dari hadirnya ruang partisipatif tersebut dapat dilihat dari pemberian keleluasaan kepada mahasiswa dalam

melaksanakan program pengabdian masyarakat secara mandiri. Kegiatan ini bersifat terbuka dan tidak terikat pada program kampus formal seperti KKN, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk merancang programnya sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber,

Kendati demikian, partisipasi mahasiswa dalam aspek pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Tidak tersedia mekanisme yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam perumusan kebijakan, evaluasi program, maupun sistem banding terhadap keputusan yang dianggap merugikan. Ketika mahasiswa menghadapi persoalan akademik, respons dari pengelola program hanya bersifat motivasional, tanpa diikuti kebijakan afirmatif.

> "Tidak ada kebijakan khusus. hanya pernah ada yang IP-nya rendah dan diberi motivasi."
> **(Wawancara P4OP, 5 Maret 2025)**

Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun ruang partisipatif dibuka, peran mahasiswa masih terbatas pada tingkat pelaksanaan simbolik. Simpulannya, praktik *self-governance* dalam program ini belum menyentuh aspek struktural atau strategis. Dalam perspektif *Governability*, hal ini menunjukkan bahwa bentuk *self-governance* masih bersifat moral dan simbolik, belum mendekati bentuk kemandirian substantif dalam tata kelola.

> "Sosialisasi disampaikan kepada koordinator mahasiswa penerima KJMU untuk kemudian diteruskan kepada penerima dari masing-masing perguruan tinggi."
> **(Wawancara P4OP, 6 Mei 2025)**

Pihak kampus memiliki peran administratif dalam program KJMU, terutama dalam memverifikasi status akademik mahasiswa serta menjadi penghubung teknis antara mahasiswa dan P4OP. Sosialisasi program dilakukan melalui penunjukan koordinator di masing-masing perguruan tinggi yang bertanggung jawab menyampaikan informasi ke mahasiswa penerima bantuan.

> "Penyusunan regulasi mempertimbangkan kondisi lapangan dan hasil evaluasi atas program yang telah dilaksanakan."
> **(Wawancara P4OP, 6 Mei 2025)**

Berdasarkan data yang diperoleh, penyusunan regulasi memang mempertimbangkan masukan dari pelaksanaan lapangan. Namun, perlu

diluruskan bahwa masukan tersebut tidak selalu berasal dari institusi kampus secara formal. Di beberapa universitas, terdapat forum mahasiswa penerima KJMU yang dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa. Forum ini menjadi ruang alternatif komunikasi horizontal antar penerima bantuan dan sering menjadi saluran awal penyampaian informasi dari Pengelola kepada penerima bantuan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat mekanisme formal yang menjamin bahwa suara dari forum mahasiswa tersebut maupun pihak kampus secara sistematis terakomodasi dalam proses deliberasi dalam penyusunan kebijakan.

> "Saat ini tidak ada mekanisme banding."
> **(Wawancara P4OP, 6 Mei 2025)**

Berdasarkan temuan di lapangan ketiadaan mekanisme banding ini mencerminkan adanya kekosongan prosedural dalam sistem pengelolaan KJMU, terutama terkait perlindungan hak mahasiswa sebagai penerima bantuan. Dalam konteks kebijakan publik, suatu mekanisme banding merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tanpa adanya saluran resmi untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi, mahasiswa yang terkena dampak kebijakan secara sepihak, seperti pencabutan bantuan, tidak memiliki ruang untuk membela diri atau memperbaiki data yang dianggap bermasalah.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelibatan institusi perguruan tinggi dalam program KJMU bersifat administratif dan terbatas pada aspek teknis, seperti verifikasi status mahasiswa dan penyampaian informasi dari pihak pengelola program. Tidak terdapat mekanisme formal yang mengatur pelibatan kampus dalam proses pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, bentuk interaksi antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi belum mencerminkan kemitraan strategis yang sejajar.

> "Proses komunikasi yang kami lakukan antara kami dan perguruan tinggi maupun institusi lain melalui surat dinas"
> **(Wawancara P4OP, 17 Januari 2025)**

Lebih jauh, koordinasi teknis antara P4OP dan perguruan tinggi berjalan melalui kanal administratif seperti surat dinas dan rapat koordinasi, namun belum membentuk relasi kemitraan strategis yang ideal. Interaksi ini bersifat konsultatif dan belum mencerminkan bentuk *co-governance* sejati yang ditandai oleh adanya kolaborasi horizontal dan pembagian kekuasaan dalam penyusunan maupun pengawasan kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan antarlembaga bersifat vertikal dan prosedural, bukan relasional dan deliberatif. Simpulannya, pola relasi yang terjadi masih cenderung administratif, belum berkembang menjadi jejaring tata kelola bersama. Dalam teori Jan Kooiman, situasi ini menunjukkan keterbatasan dalam governing interaction, karena interaksi belum membentuk ruang sosial yang memungkinkan proses co-steering antarpelaku.

Pada akhirnya, pola interaksi dalam tata kelola KJMU secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan kuat terhadap model *hierarchical governance*. Keputusan strategis ditentukan oleh pimpinan daerah dan dieksekusi oleh pelaksana teknis di bawah struktur Dinas Pendidikan.

> "Dari P4OP tetap memberikan evaluasi, tetapi keputusan berada di pimpinan."
> **(Wawancara P4OP, 17 Januari 2025)**

Temuan ini memperjelas bahwa pengambilan keputusan strategis masih tersentralisasi pada struktur pemerintahan daerah. Simpulannya, model governing interaction pada program ini lebih menyerupai birokrasi komando daripada dialog kebijakan.

Dari perspektif *Governability*, dominasi model hierarchical governance ini mencerminkan rendahnya keterbukaan sistem terhadap masukan dari aktor-aktor lain, sehingga berpotensi menghambat fleksibilitas dan adaptabilitas tata kelola. Dengan model seperti ini, meskipun efisien dari sisi kendali birokratis, interaksi program KJMU berisiko menutup ruang aspirasi dari bawah dan memperlemah akuntabilitas program. Meskipun terdapat forum komunikasi internal

yang dibentuk oleh mahasiswa penerima KJMU di masing-masing perguruan tinggi, fungsi forum tersebut lebih berperan sebagai media penyampaian informasi dari P4OP kepada para penerima bantuan melalui perantara koordinator kampus. Forum ini tidak dirancang sebagai ruang dialog dua arah yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan aspirasi atau terlibat dalam perumusan kebijakan secara substantif. Dengan demikian, ketiadaan forum resmi dan tetap yang mempertemukan aktor-aktor tata kelola memperkuat simpulan bahwa pola interaksi yang terbentuk masih cenderung bersifat top-down dan sepihak.

Relasi dalam tata kelola program KJMU masih menunjukkan dominasi kuat dari aktor pemerintah, khususnya P4OP, dengan minimnya mekanisme dialog dua arah antara pengelola dan penerima manfaat. Meskipun terdapat ruang partisipatif terbatas seperti call center dan media sosial, interaksi tersebut lebih bersifat informatif daripada deliberatif. Dalam perspektif governability, kondisi ini menunjukkan bahwa komponen *governing interaction* belum berkembang secara optimal sebagai arena pertukaran gagasan, aspirasi, dan evaluasi bersama. Ketimpangan relasi ini menjadi indikator lemahnya aspek partisipatif dalam tata kelola interaktif, yang idealnya mencerminkan prinsip keterbukaan, responsivitas, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Berdasarkan keseluruhan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam tata kelola KJMU terletak pada lemahnya interaksi antara aktor yang mengatur (*Governing System*) dan yang diatur (*System To Be Governed*). Dominasi birokrasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, minimnya ruang deliberasi publik, serta keterbatasan saluran aspirasi menyebabkan tidak terbangunnya *governing interaction* yang setara. Padahal, dalam konteks governability, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antarpelaku dalam merespons keberagaman, kompleksitas, dan dinamika

sosial penerima manfaat. Lemahnya aspek ini menjadikan interaksi sebagai titik rawan sekaligus kunci perbaikan tata kelola ke depan.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian "Tata Kelola Program Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta", maka didapatkan kesimpulan bahwa program ini menunjukan dinamika yang kompleks. Dalam konteks *Governability*, pelaksanaan program ini didominasi pendekatan hierarkis yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor sentral dalam pengambilan keputusan, dengan partisipasi aktor non-pemerintah yang terbatas. Hal ini tampak melalui mekanisme distribusi, evaluasi, hingga pengawasan program yang belum sepenuhnya terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor.

Pada aspek *governing system*, pengelolaan program masih didominasi oleh aktor negara, khususnya Dinas Pendidikan dan P4OP. Hal ini ditunjukkan dengan perguruan tinggi hanya dilibatkan secara administratif dan mahasiswa tidak memiliki kanal partisipatif dalam proses evaluasi maupun perumusan kebijakan. Elemen tata kelola seperti *governing image*, *instrument*, dan *action* memang telah tersedia melalui visi normatif, perangkat regulatif, dan mekanisme teknis pelaksanaan, namun masih bersifat teknokratis dan prosedural. Hal ini juga tercermin dari *order of governance* yang cenderung berada pada tingkat operasional *(first-order)* dan regulatif *(second-order*), tanpa disertai refleksi strategis sebagaimana yang dicerminkan dalam *meta-order governance.*

Disisi lain, pada dimensi *System To Be Governed,* mahasiswa penerima KJMU memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi domisili maupun jenis perguruan tinggi. Keberagaman ini menuntut penyesuaian layanan dan kebijakan yang lebih fleksibel. Namun, kebijakan yang diterapkan saat ini masih bersifat seragam dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok penerima, yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam akses dan manfaat program. Kompleksitas sistem sosial dan kelembagaan serta tekanan institusional juga menjadi tantangan yang signifikan dalam

pelaksanaan program KJMU, terlebih pada proses koordinasi antarinstansi dan pengelolaan data yang melibatkan banyak pihak sering kali mengalami kendala. Keterbatasan sumber daya manusia di Pusat Pelayanan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) menjadi faktor yang menghambat akurasi data dan kelancaran pencairan dana, sehingga mengurangi efektivitas program.

Sementara itu, *governing interaction* antara pemerintah, kampus, dan mahasiswa masih bersifat satu arah dan belum membentuk ruang deliberatif yang setara. Interaksi yang ada lebih menyerupai pola penyampaian informasi dari pemerintah ke aktor lain, tanpa keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, pada penelitian ini memetakan secara lebih spesifik permasalahan-permasalahan utama yang muncul dalam pelaksanaan program KJMU, dan menempatkan secara sistematis dalam kerangka *Governability*. Permasalahan manipulasi data dan manipulasi domisili ditemukan terkait erat dengan aspek *Governing System*, terkhusus pada *Governing Instrumen,* yang mencerminkan pembaharuan sistem pendaftaran dengan menggunakan website (secara daring), yang dimana hal ini juga digunakan untuk mengurangi manipulas data yang dilakukan oleh calon penerima.

Selanjutnya, inkonsistensi pencairan dana dianalisis melalui aspek *System to be Governed*, pada *complexity* yang mengungkap perbedaan jenis universitas yang bekerja sama dengan KJMU. Hal ini menyebabkan inkonsistensi pencairan dana dikarenakan tiap-tiap kampus memiliki kebijakan dan koordinasi yang berbeda-beda. Adapun pencabutan bantuan secara sepihak dikaji dalam aspek *Governing Interaction*, yang menunjukkan masih dominannya pola komunikasi *top-down* dan absennya mekanisme partisipatif atau ruang banding yang adil bagi penerima manfaat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola program KJMU masih berada dalam kerangka *governance* yang bersifat hierarkis dengan dominasi aktor pemerintah sebagai pengendali utama. Dari ketiga komponen teori governability *Governing System* (GS), *System to be Governed* (SG), dan *Governing Interaction* (GI), aspek *Governing Interaction* menjadi yang paling

lemah namun paling menentukan. Ketiadakidealan mekanisme interaksi yang dialogis, rendahnya pelibatan mahasiswa sebagai aktor sosial, serta minimnya inovasi partisipatif menyebabkan tata kelola belum mampu menjawab kompleksitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas GI melalui model tata kelola kolaboratif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan program beasiswa yang inklusif, adil, dan adaptif.

B. SARAN

Mengacu pada hasil dari kesimpulan, peneliti merumuskan beberapa saran dalam penelitian ini diantaranya:

1. Program KJMU perlu memperkuat partisipasi penerima dan aktor non-pemerintah, menyesuaikan kebijakan dengan keragaman penerima, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme evaluasi dan umpan balik agar program tetap relevan dan berkeadilan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memperluas cakupan studi baik pada program bantuan pendidikan serupa di daerah lain maupun melalui pendekatan teori tata kelola yang lebih mutakhir. Selain itu, penggunaan media digital sebagai ruang interaksi dan partisipasi aktor juga dapat dijadikan fokus kajian guna memperkaya analisis *Governability* dalam konteks kebijakan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, K. K. (2018). The capacity of local governments in Nepal: from government to governance and governability? *Asia Pacific Journal of Public Administration*.

Aghnia Ilmi Diniyati, G. F. (2024, Mei). Pola Pengeluaran Penerima Beasiswa KIP KULIAH: Prioritas Penggunaan Dana Antara Kebutuhan Esensial dan Gaya Hidup. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital (JIMaKeBiDi)*.

Ali Roziqin, I. M. (2019). *Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas.*

Angelina, M. C. (2024). *Pengaruh Perilaku Penerimaan Bantuan Dana Kjmu Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Universitas Nasional.*

Arnia Fajarwati, U. R. (2022). *Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle.*

Ayuningtyas, V. (2021). *Evaluasi Pengelolaan Dana Dan Pemodelan Calon Penerima KJMU Di Provinsi Dki Jakarta.*

Bahruddin, H. W. (2013). Tata Kelola Beasiswa Di UGM (Studi tentang Evaluasi Program Beasiswa Bank Indonesia di Universitas Gadjah Mada Periode 2011-2012). *repository.ugm*.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*

Difa Puspa Dalla a, H. K. (2023, Agustus). Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 52-59.

Dini Dwi Anggraini, R. H. (2024). *Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang.*

Fitriani. (n.d.). Keterbukaan Informasi Dana Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 20-28.

Gemiharto, I. &. (2017). ata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 103-114.

Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *at-Taqaddum*.

Hilwa, S. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Beasiswa Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMK Negeri 4 Jakarta.

Imronah. (2009). Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya .

Jakarta, D. (2024, June 23). *Informasi Umum*. Retrieved from Kartu Jakarta Pintar: https://kjp.jakarta.go.id/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6JzRlNzMyY2VkMzQ2M2QwNmRlMGNhOWExNWI2MTUzNjc3JywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcwNDVhMDVmOWNmOCd9

Jakarta, D. P. (2024, Juni 27). *Disdik DKI Jakarta Pastikan Dana KJMU Didistribusikan Mulai Besok dan Dapat Dimanfaatkan Penerima Bantuan*. Retrieved from Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta: https://disdik.jakarta.go.id/article/2746-disdik-dki-jakarta-pastikan-dana-kjmu-didistribusikan-mulai-besok-dan-dapat-dimanfaatkan-penerima-bantuan/

Jayen, F. (2018). *79pengaruh Beasiswa Dan Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Prestasi Belajaraktivis Mahasiswastie Pancasetia Banjarmasin.*

Kooiman, J. (1993). *Modern Governance.* SAGE Publications Ltd.

Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance.*

Kooiman, J., Bavinck, J., Chuenpagdee, R., Mahon, R., & Pullin, R. (2008). *Interactive Governance and Governability: An Introduction.*

Kübler, D., Rochat, P. E., Woo, S. Y., & Heiden, N. v. (2019). Strengthen governability rather than deepen democracy: why local governments introduce participatory governance. *Sage Journal*.

Kurniawan, K. &. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari. *Jurnal Administrasi Publik*.

Lasmiatun. (2017). “Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/LKMS untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif” . *DIMENSI: Journal of Sociology*.

Lynn, L., Heinrich, C., & Hill, C. (2001). *Improving Governance* .

Mayntz, R. (1996). Political Control: The Rise, Decline, and Transformation of a Theory (pp. 148–168). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Mayntz, R. (2004). Governance Theory as a Further Developed Control Theory? 10.

Michel Crozier, S. P. (1975). The Crisis Of Democracy. *New York University Press*.

Nanang Suparman, A. R. (2022). Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus Dengan Mekanisme Baru Pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta. *jurnal dialektika*.

Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik.* Jakarta.

Purwanti, P. N. (2023). Sosialisasi Tata Kelola Dana Bantuan Sosial Masyarakat serta Aksi Berbagi Jumat Berkah. *Ta'awun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24-41.

Rauzalia. (2023). Evaluasi Program Beasiswa Kartu Indonesia.

Rhodes, R. (1997). *Understanding Governance.*

Riza, F. (2024). *Rekonstruksi Nilai Kesadaran Sosial Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pada Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Nasional Penerima KJMU).*

Rusi Rusmiati Aliyyah, S. W. (2020). Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi. *Journal of Administration and Educational Management*.

Safitri, R. M. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif.* Semarang.

Sagita, R. R. (2021). Evaluasi Program Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dI UIN Jakarta.

Samputra, P. L. (2019). Efektivitas Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia dengan Pendekatan Non-Parametrik. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.

Siswanto, V. A. (2023). *Pengaruh Implementasi Program Beasiswa Terhadap Motivasi Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Stmik Widya Pratama Pekalongan.*

Stoker, D. M. (2002). *Theory and Methods in Political Science.* New York.

Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Administrasi.*

Tasyak, U. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten.*

Tryatmoko, M. W. (2016). Menata Ulang Kebijakan Pemekaran Daerah Di Indonesia.

Utami, Y. P. (2021). Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau.

Williamson, O. E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization.

Wulandari, Y. (2023). Tata Kelola Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh dalam Program Beasiswa di Yatim Mandiri Kita Kediri. *repository.uit*.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods.*

Yusman, A. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (Kjmu) Di Universitas Negeri Jakarta Menggunakan Model Logical Framework Analysis (Studi Pada: Mahasiswa Penerima Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Di Universitas Negeri Jakarta.*

LAMPIRAN


SATUAN PELAKSANA PENDIDIKAN KECAMATAN CA
SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I JAKARTA TIMUR




Selamat atas Dilantiknya
Bapak Pramono Anung &
Bapak Rano Karno
Sebagai Gubernur & Wakil Gubernur DKI Jakarta
Periode 2025 - 2030
Mari bersama kita dukung berjalan
program untuk membangun Jakarta
menuju Kota Global
PEMERINTAH PROVINSI DA
IBUKOTA JAKARTA
DINAS
AN
PUSAT PELAYANAN PEMBIAYAAN P
RASIONAL PENDIDIKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PENULIS

Nama	: Rahmad Adi Satrio
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 30 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: RGTC Blok Angsana No 117, RT.002/RW.010, Cakung Barat, Cakung, DKI Jakarta
Telepon/HP	: +6208811897835
Email	: Rahmadadisatrio@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1) TK Sejahtera III
2) SD Swasta Kasih Ananda I
3) SMP Negeri 30 Jakarta Utara
4) SMA Negeri 92 Jakarta Utara

RIWAYAT ORGANISASI

1) Komunitas Ruang Abaca